

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA KOMPONEN BANGSA
GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

TRISMAWAN DJONISAJOKO, S.E.,M.M.

KOLONEL LAUT (S) NRP10774/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **"Pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan Nasional"**.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Inspektur Jenderal Polisi Drs. Sumadi, M.si. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

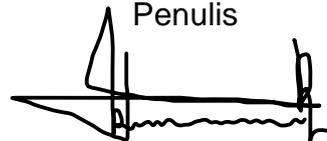
Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 09 Agustus 2022

Penulis



Trismawan Djonisajoko, S.E., M.M
Kolonel Laut (S) NRP NRP10774/P

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trismawan Djonisajoko,S.E.,M.M
Pangkat : Kolonel Laut (S) NRP NRP10774/P
Jabatan : Sahli D Jemen Pok Sahli
Instansi : Koarmada I

Sebagai peserta Program Pendidikan reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, 09 Agustus 2022
Penulis

Trismawan Djonisajoko,S.E.,M.M
Kolonel Laut (S) NRP NRP10774/P

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang lingkup dan sistematika	5
5. Metode dan pendekatan.....	6
6. Pengertian.....	7
BAB II PENDAHULUAN	
7. Umum.....	9
8. Peraturan perundang-undangan	9
9. Kerangka teoritis	12
10. Data dan Fakta.....	15
11. Lingkungan strategis	25
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum.....	33
13. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional	33
14. Implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional	40
15. Memaksimalkan keteladanan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional ..	47

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	53
17. Rekomendasi	55

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. Alur Pikir.
2. Platform Media Penyebar Hoax.
3. Indek Ketahana Nasional Periode Desember 2021.
4. Daftar Riwayat Hidup Penulis.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tren Peristiwa dan tindakan Intoleransi di Indonesia	21
Gambar 2.2. Tren Intoleransi dalam perspektif Agama	22
Gambar 3.1. 10 besar provinsi dengan dengan pelanggaran toleransi di Indonesia	38
Gambar 3.2. Jenis Tindakan Tertinggi dalam Pelanggaran toleransi di Indonesia	34



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Esensi pemahaman nilai-nilai kebangsaan	34
Tabel 3.2. Data tindakan intoleransi dan radikalisme pada lembaga negara	37
Tabel 3.3. Tindakan korupsi oleh pejabat publik selama 2021	48



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman terbesar di dunia, selain berada pada posisi ke empat negara dengan penduduk terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 273.879.750 Jiwa yang berada diantara 17.404 pulau dan terdiri dari 1.340 Suku/etnik¹. Pada dasarnya keragaman yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan nasional. Namun di sisi lain hal tersebut mengandung potensi terjadinya instabilitas yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi titik retak yang akan menimbulkan terhambatnya pembangunan nasional. Salah satu pilar pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta adaptif serta menguasai pengetahuan dan teknologi Idealnya Indonesia memiliki sumberdaya yang sangat besar dalam mendukung berjalanya pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sendiri harus didukung oleh terbangunnya ekosistem yang kondusif dan mantapnya nilai-nilai kebangsaan pada komponen-komponen bangsa.

Sehingga pemantapan nilai-nilai kebangsaan bertujuan membangun karakteristik bangsa, membangun rasa, semangat dan jiwa kebangsaan (nasionalisme), membangun kesadaran terhadap sistem nasional dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada 4 (empat) konsensus dasar bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sarat dengan nilai-nilai luhur teras terpinggirkan sejak keran demokrasi terbuka lebar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia².

Nilai-nilai luhur yang diinterpretasikan sebagai nilai kebangsaan yang berasal dari 4 konsensus dasar sebagai nilai yang disepakati oleh *founding*

-
1. www.kemendagri.go.id_Ditjen_Dukcapil, (2022) Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2022, diakses tanggal 29 Januari 2022 jam 20,00
 2. www.lemhannas.go.id Lemhannas (2022) Lemhannas selenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan secara virtual, diakses tanggal 29 Januari 22.00

father bangsa Indonesia saat ini menjadi bagian yang harus dimengerti, dipahami dan di amalkan dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam beberapa waktu kebelakang tengah mengarah pada kehidupan yang mementingkan kepentingan pribadi (Individualistik) yang berorientasi pada materi (materialistic) sehingga mengakibatkan aspek-aspek kebangsaan semakin jauh dari jati diri bangsa, dimana berdasarkan fakta di lapangan indeks ketahanan nasional tahun 2021 menunjukkan angka penurunan pada gatra-gatra tertentu berkaitan dengan ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang bersumber dari empat konsensus dasar kehidupan nasional Indonesia perkembangan astagatra di Indonesia telah mengalami beberapa kemunduran dan dalam kondisi yang memprihatinkan.³

Beberapa permasalahan dari perkembangan aspek kehidupan yang muncul di Indonesia dalam beberapa pespektif disebabkan cepatnya perubahan sosial akibat kemunculan era *post truth* yang muncul akibat arus informasi yang semakin terbuka dengan adanya teknologi internet. Namun fasilitas yang telah di akomodasi oleh internet ternyata tidak menjamin terbukanya pemikiran seseorang. Faktanya justru kondisi dalam beberapa waktu terakhir akibat perkembangan internet berdampak pada banyaknya muncul narasi prasangka-prasangka yang kerap kali muncul akibat pemberitaan palsu (Hoax)⁴.

Hoax yang kemudian berkembang dan mengarah kepada ujaran-ujaran kebencian yang muncul dengan memanfaatkan media internet merupakan ancaman laten yang muncul sepanjang tahun. Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2019, 87,50 persen responden mengklaim menerima hoax melalui media sosial dan 67 persen melalui aplikasi obrolan. Tema hoax yang paling banyak diterima oleh responden adalah tema sosial-politik (93,20 persen), SARA atau diskriminasi berbasis suku, agama, dan ras (76,20 persen), dan pemerintah (61,70 persen). Isu-isu yang berkembang seperti politik identitas akan diperparah dengan sistem "*algoritma*" pada platform media sosial yang memiliki sistem *filter bubble*

3. Indeks Ketahanan Nasional 2021, Lembaga Ketahanan Nasional

4. www.kompas.com Laksono Hari wiwoho (2019) Kemunculan Hoax dan ancaman nyata yang muncul akibat Hoax, diakses 30 Januari 2022 jam 23.00

berdampak pada hoax dan ujaran kebencian menyebabkan pengguna media sosial maupun media online terperangkap dalam ruang gema (*Echo chamber*) yang semakin mempengaruhi emosi pengguna media sosial dalam menyikapi sebuah informasi yang muncul.

Narasi nilai-nilai kebangsaan yang tereduksi oleh dampak negatif media sosial dan internet juga diperparah dengan tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata dan menyebabkan masyarakat yang belum memiliki standar untuk memilah dan mengevaluasi secara kritis informasi yang membanjiri media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube hingga aplikasi percakapan seperti Whatsaap, Line dan Telegram. Padahal berpikir kritis menjadi sebuah syarat penting dalam menerima dan mengolah informasi yang diterima bila informasi tersebut tidak berasal dari sumberi seperti media pers (yang selalu dituntut melakukan verifikasi sebelum menyebarkan sebuah berita)⁵.

Beberapa hal tersebut dapat di interpretasikan bahwa terdapat mispersepsi dan adanya paham yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang terjadi pada tataran elit yang merupakan dampak dari adanya perbedaan visi dalam tata kelola sistem kenegaraan, hal tersebut kemudian berakibat pada mudahnya merambah kedalam kehidupan masyarakat "*grasss root*" (Masyarakat tingkat bawah) dan ternyata konsekuensi tersebut berdampak negatif pada hubungan sosial masyarakat yang kemudian menciptakan segmentasi pada masyarakat yang terbagi menjadi berbagai kepentingan maupun sentiment berlatar belakang kedaerahan, religiusitas (keagamaan) hingga ideologis, akibatnya kondisi persatuan menjadi berkurang dan kesatuan bangsa menjadi semakin merenggang.

Di sisi lain, terjadi konflik kepentingan politik yang menjadi hambatan besar bagi kemajuan bangsa, karena proses pembangunan nasional terabaikan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat guna mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan beberapa fakta tersebut dapat di tafsirkan bahwa terdapat degradasi nilai-nilai

5. Septiaji Eko Nugroho (2021) Strategi Multipihak dalam melaksanakan mitigasi hoax dan ujaran kebencian menjelang pemilu 2024, Jurnal Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

kebangsaan di kalangan masyarakat, sehingga untuk mereduksi dan mencegah semakin meluasnya hal tersebut maka diperlukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa sehingga dapat mendukung pembangunan nasional.

Mengingat tantangan Indonesia ke depan semakin berat perlu kiranya untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan kepada komponen bangsa agar bangsa Indonesia dapat mengatasi segala macam ancaman. guna mendukung pembangunan nasional, dimana manfaat yang diharapkan melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat terbentuk dari warga negara yang berkarakter, berakhlak, dan beretika bangsa yang jelas dan stabil, yang akan menjadi pedoman pedoman hidup masyarakat sesuai dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara dari Indonesia.

Mengacu pada uraian tersebut pada dasarnya dapat disintesis bahwa terdapat hubungan korelasional antara mantapnya nilai-nilai kebangsaan dengan berjalanya pembangunan nasional, terlebih di era globalisasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan keterbukaan nilai kebangsaan berperan dalam penanaman rasa, paham dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat dalam perkembangan terakhir kondisi kebangsaan tengah menghadapi penurunan yang diperlihatkan semakin merebaknya hoax, ujaran kebencian serta tidak kondusifnya ekosistem pada lembaga pemerintah sendiri ditunjukkan dengan tidak mantapnya nilai-nilai kebangsaan yang terlihat dari fenomena fenomena yang tidak sesuai dengan nilai keadilan, demokrasi, ketaatan pada hukum dan toleransi rendahnya keteladanan yang kesemuanya berkontribusi pada tereduksinya nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa.

Kekuatan nilai-nilai kebangsaan yang dipahami, diimplementasikan dan adanya keteladanan pada komponen bangsa perlu dijaga melalui pemantapan nilai nilai kebangsaan pada komponen bangsa tentu diharapkan juga menjadi motor penggerak untuk membangkitkan aspirasi dan semangat masyarakat yang semakin mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan nasional yang juga akan berimplikasi kepada

terwujudnya ketahanan nasional Indonesia yang mampu menjaga keutuhan bangsa dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

2. Rumusan Masalah.

a. **Rumusan masalah.** Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah: Bagaimana pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung Pembangunan Nasional?

b. **Pertanyaan Kajian.** Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka beberapa pertanyaan kajian dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional?
- 2) Bagaimana implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional?
- 3) Bagaimana memaksimalkan keteladanan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa sebagai upaya mendukung Pembangunan Nasional.

b. **Tujuan.** Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan dalam rangka memecahkan permasalahan terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa di Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup penyusunan Taskap ini dibatasi pada pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa yang dibatasi

pada Lembaga Negara dan Lembaga Masyarakat guna mendukung pembangunan nasional.

b. **Sistematika.** Penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1) **BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang perlunya pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa sebagai upaya dalam mendukung Pembangunan Nasional, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan serta pengertian-pengertian.

2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta dan lingkungan strategis yang mendukung penulisan dan informasi lainnya untuk mengalisis pada BAB III.

3) **BAB III PEMBAHASAN.** Pada bab ini merupakan analisis/pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan menjawab pertanyaan kajian yang telah dirumuskan, sehingga hasil pembahasan dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ditemukan.

4) **BAB IV PENUTUP.** Pada bab ini penulis menjelaskan tentang simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan ringkasan tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penulisan Taskap ini. Sedangkan rekomendasi merupakan saran dari penulis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan yang dikaji.

5. Metode dan pendekatan.

a. **Metode.** Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode untuk menganalisis dan menggambarkan suatu hasil kajian pada

bidang yang ditentukan. Gambaran mengenai situasi atau kejadian diperoleh dengan cara mengakumulasi data.⁶

b. **Pendekatan.** Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam mencari makna dan pemahaman dari fenomena yang ditemukan.⁷ Dalam analisis data, pengkaji melakukan secara naratif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

6. Pengertian.

a. **Bangsa.** Bangsa merupakan sekelompok himpunan manusia yang memiliki kesatuan karakter dan adanya kesamaan perspektif “tanah air” dari sekelompok orang yang tinggal pada suatu tempat⁸.

b. **Kebangsaan.** Kebangsaan adalah sebuah kata serapan yang berasal dari kata dasar bangsa yang memiliki makna rasa memiliki terhadap sebuah bangsa, yang berasal dari instrument-instrumen perekat bangsa seperti empat konsensus dasar pembentuk negara, dimana implementasi dari empat konsensus dasar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dibentuk berlandaskan kebangsaan yang mengutamakan integrasi bangsa yang Bersatu⁹.

c. **Komponen Bangsa.** komponen bangsa dapat didefinisikan dalam konteks historis sebagai komponen-komponen pembentuk negara dan komponen yang terlibat dalam kesepakatan bentuk dan ideologi negara seperti dari komponen agama, komponen nasionalis dan komponen Hankam yang diaktualisasikan menjadi lembaga-lembaga sebagaimana penjelasan berikut (Kesbangpol, 2020) :

- 1) Lembaga negara. Merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UUD 1945, lembaga negara sendiri merupakan

6. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 29.
 7. Yusuf, Muri (2017) Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
 8. Abdulsyani (1994) Sosiologi : Suatu Pengantar. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
 9. Kemendikbud (2010) Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta : Kemendikbud

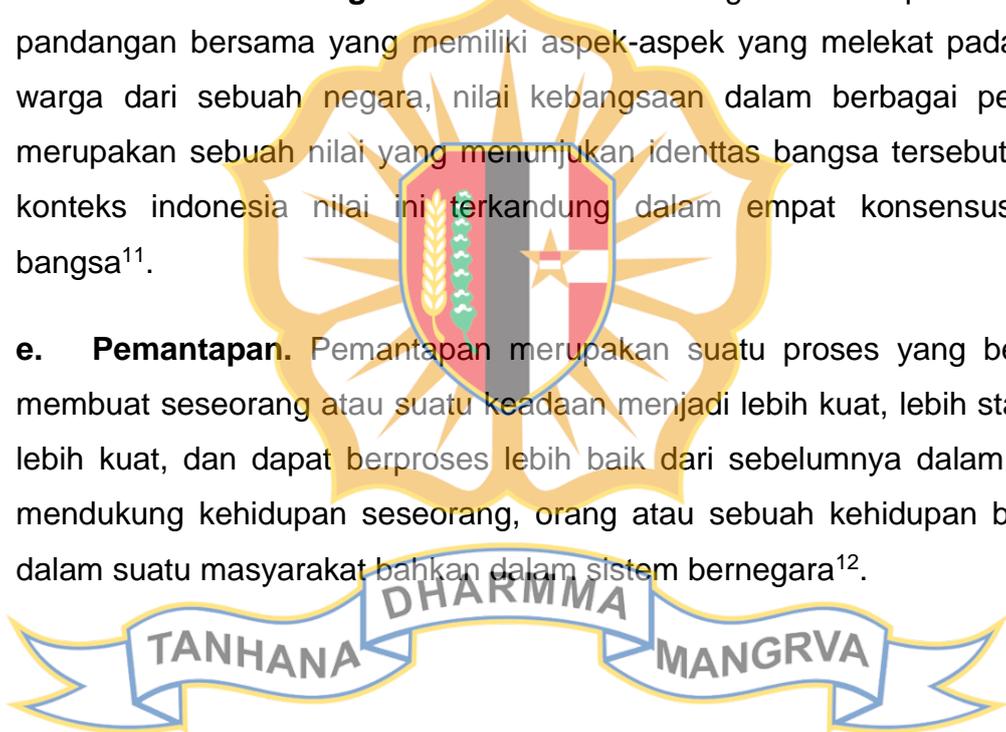
institusi yang dibentuk dan memiliki sistem yang dibentuk berdasarkan tujuan dan fungsi negara dan menyelenggarakan dan mendukung pemerintahan¹⁰.

2) Lembaga Masyarakat. merupakan organisasi yang berada di masyarakat yang didirikan masyarakat sebagai penunjang dan pendukung berjalanya sistem bernegara.

3) Lembaga pertahanan-keamanan. Merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara yang kemudian di definisikan sebagai TNI-Polri.

d. Nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan merupakan sebuah pandangan bersama yang memiliki aspek-aspek yang melekat pada setiap warga dari sebuah negara, nilai kebangsaan dalam berbagai perspektif merupakan sebuah nilai yang menunjukkan identitas bangsa tersebut, dalam konteks Indonesia nilai ini terkandung dalam empat konsensus dasar bangsa¹¹.

e. Pemantapan. Pemantapan merupakan suatu proses yang berusaha membuat seseorang atau suatu keadaan menjadi lebih kuat, lebih stabil dan lebih kuat, dan dapat berproses lebih baik dari sebelumnya dalam rangka mendukung kehidupan seseorang, orang atau sebuah kehidupan bersama dalam suatu masyarakat bahkan dalam sistem bernegara¹².



10. www.kompas.com Arifin Damayanti (2019) Lembaga negara : Pengertian, fungsi, tujuan dan tugas. Diakses tanggal 31 Januari 2022 Jam 21.30

11. Budiarmo, Miriam (2008) pengantar Ilmu Politik, Jakarta : Universitas Indonesia Publisher.

12. Kemendikbud (2010) Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta : Kemendikbud

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dilakukan untuk menjamin komponen bangsa dan mendapatkan bekal, persepsi yang sama dan meningkatkan pemahaman terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa. Dengan adanya bekal, persepsi, dan pemahaman yang sama terkait wawasan dan nilai-nilai kebangsaan komponen bangsa mampu memberikan kontribusi positif sesuai dengan peran masing-masing untuk mendukung pembangunan nasional. Mantapnya nilai-nilai kebangsaan juga perlu ditumbuhkan dan dibangun jiwa kompetitif dalam pembangunan nasional agar Indonesia dapat menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia untuk mencapai daya saing global dan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun permasalahan terkait dengan kerentanan terhadap memudarnya nilai-nilai kebangsaan yang di alami oleh bangsa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir perlu di analisa sehingga dalam menganalisis permasalahan dan mendapatkan solusi ilmiah diperlukan dasar analisis seperti peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta lingkungan strategis sebagai landasan yang tepat bagi pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. **Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (1).** Dimana bunyi dari pasal tersebut memiliki makna dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pilihan dengan bentuk kesatuan dan persatuan tersebut dimaksudkan agar bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan (integrasi).

b. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Dalam UU ini terutama yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan wajib

ikut serta dalam membela negaranya, hal tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang mengatur warga negara dalam upaya bela negara.

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 15 ayat 1 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan sebagai salah satu tugas dari MPR yaitu mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD 1745. UU ini pada dasarnya merupakan sebuah pedoman dan upaya dalam membantu para pengelola pemerintahan dan kelompok masyarakat dalam salah paham dan salah mengartikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional pembetulan dan peradaban empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, keberadaan dan perannya akan memudar seiring berjalannya waktu. Kemudian akan mempengaruhi terselenggaranya tata kelola bernegara yang tidak optimal.

d. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam UU ini khususnya yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan pengaturan terkait praktek dan penggunaan simbol negara seperti bendera, bahasa, lambing negara, serta lagu kebangsaan, dimana terdapat tiga inti makna yang tertuang dalam UU ini, pertama sebagai upaya dalam memperkuat kesatuan dan persatuan NKRI, Kedua menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa dan kesatuan NKRI ketiga, membangun dan menciptakan ketertiban, kepastian juga adanya standar penggunaan lambang negara, bahasa maupun lagu kebangsaan negara.

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Dalam Perpres tersebut menjelaskan mengenai Lemhannas RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah tanggung jawab Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan, mengkoordinasikan, Mensinkronkan dan pengendalian. Secara fungsional Lemhannas RI

memiliki tugas yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengkajian yang memiliki sifat konsepsional dan strategis terkait permasalahan nasional bangsa, regional dan internasional yang diperlukan oleh Presiden agar terjaminnya keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

f. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden ini sesuai dengan Pasal 3 menjelaskan bahwa Misi BPPI adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan pemikiran Pancasila, mengkoordinasikan, mensinkronkan, mengendalikan perkembangan pemikiran Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan persiapan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat), dan memberikan nasihat tentang pelanggaran kebijakan atau peraturan Pancasila kepada lembaga tingkat tinggi nasional, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik dan komponen sosial lainnya.

g. Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam Inpres ini menjelaskan terkait upaya dalam memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang dilaksanakan melalui konsep revolusi mental dengan landasan yang digunakan adalah nilai, etos kerja hingga integritas yang bermuara pada gotong royong sebagai karakteristik budaya bangsa, konteks budaya bangsa dalam tujuan revolusi mental ini menghendaki adanya budaya yang bermartabat, modern dan sejahtera yang berlandaskan pada Pancasila. Instruksi yang menjadi acuan adalah adanya penunjukan kepada para stakeholder untuk mendukung terwujudnya revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden seperti jajaran Menteri Kabinet, Jaksa Agung, Panglim TNI, Kapolri, Gubernur hingga pemimpin daerah (Walikota/Bupati).

h. Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Permendagri ini memiliki inti sebagai pedoman bagi tereselenggaranya revitalisasi terkait pengembangan SDM agar mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, ide utama dari peraturan Menteri ini adalah menghendaki agar SDM Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan adanya jiwa nasionalisme dan patriotisme.

i. Peraturan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan sebagai pedoman dalam penguatan pemahaman dan implementasi terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada empat konsensus dasar bangsa Indonesia, regulasi ini juga menghendaki agar Pemerintah daerah mewajibkan untuk menyelenggarakan Pendidikan wawasan kebangsaan (PMK). Dalam peraturan ini kepala daerah (Bupati/Walikota) membentuk PMK dengan kepengurusan didalamnya terdiri dari instansi yang ada didalam pemerintahan daerah, serta mendukung kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan kesadaran bela negara dalam memberikan penanaman sebuah perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara sebagaimana yang tertuang dalam empat konsensus dasar bangsa Indonesia.

j. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Peraturan ini merupakan pedoman yang mengamanatkan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Merupakan pengejawantahan dari Nawa Cita 8“melakukan revolusi karakter bangsa”, dengan Agenda Prioritas: Daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, dan pembentukan Kader pelatih pembauran dan kader pelatih penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan sebagai agen perubahan dalam rangka penguatan karakter bangsa. Pada tahun 2019, dari 514 kabupaten dan kota baru 134 kabupaten dan kota yang membentuk PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan).

9. Kerangka Teoritis.

Sebagai pisau analisis dalam penulisan, beberapa Perspektif teori yang digunakan dalam mendukung penulisan Taskap ini, antara lain:

a. Teori Peran. Menurut Soekanto (2002), peran adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan (status) individu maupun kelompok di sebuah sistem sosial, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melakukan suatu peran. Sedangkan status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi dari peran tersebut. Soekanto (2002) juga mendefinisikan fungsi peran yaitu¹³: peran preventif, adalah merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadi suatu keadaan yang mengganggu sehingga keadaan tersebut dapat dihindari atau dicegah. peran persuasif, adalah bentuk tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan pendekatan yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan. peran represif, adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu keadaan yang dianggap mengganggu yang bertujuan untuk mengembalikan pada keadaan semula.

b. Teori Integrasi.

Menurut Linton (1984), Integrasi adalah proses pembangunan bertahap yang bertujuan untuk mencapai kombinasi sempurna dari faktor-faktor yang bersama-sama menciptakan budaya universal (budaya holistik), menciptakan kesatuan yang komprehensif. Kemudian, dalam pandangan Soemarjan (1980) yang menyatakan bahwa integrasi sosial dapat tercapai jika ada ketergantungan antara bagian-bagian atau unsur-unsur suatu masyarakat, suatu syarat untuk mencapai integrasi, yaitu 1) Terdapat anggota masyarakat yang saling mengisi. 2) Adanya kesepakatan atau konsensus bersama yang berkaitan dengan norma

13. Soekanto, Soerjono (2002) Pengantar sosiologi, Jakarta : penerbit Raja Grafindo persada

dan nilai. 3) Pelaksanaan nilai dan norma secara konsisten dalam sebuah masyarakat¹⁴.

c. Teori Pemahaman.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Widiasworo (2017) Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan dan mengasosiasikan informasi yang didapatkan dan dipelajari menjadi sebuah kesatuan, sedangkan dalam perspektif lain, Menurut Sudjiono (2011) pemahaman (*Comprehension*) adalah sebuah kemampuan untuk mengerti dan memahami sesuatu, pemahaman juga merupakan salah satu bentuk hasil belajar yang di alami oleh manusia, dengan kata lain terjadinya sebuah pemahaman adalah terbentuk akibat adanya proses belajar dan beradaptasi dari hasil belajar tersebut.

d. Teori Implementasi.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Purwanto dan Sulistyatuti (1991) Implementasi adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan tersistematis, Purwanto dan Sulistyatuti (1991) juga menyebutkan bahwa implementasi memiliki inti makna sebagai sebuah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*delivery of Policy output*), implementasi ini dilakukan oleh sesuatu yang disebut sebagai implementator kepada kelompok sasaran yang disebut sebagai "*target group*" yang juga merupakan untuk mewujudkan kebijakan, mengacu pada beberapa uraian tersebut, dapat disintesis bahwa Implementasi adalah bermuara pada sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

e. Teori Keteladanan.

Keteladanan sebagaimana yang disampaikan oleh Hasbullah (1999) memiliki dasar makna teladan yang memiliki makna perbuatan yang dapat ditiru atau dicontoh, yang berarti jika dalam konteks

14. Soemardjan, Selo (1980) kemiskinan struktural suatu bunga rampai, Jakarta : Yayasan ilmu sosial.

keteladanan maka sesuatu hal yang dapat ditiru atau dicontoh, Hasbullah (1999) juga menyebutkan bahwa keteladanan adalah merupakan sebuah proses yang dapat dibentuk, Hasbullah (1999) menyebutkan bahwa Keteladanan adalah perilaku-perilaku yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan dijadikan contoh bagi setiap orang untuk mengetahui dan melihat, biasanya keteladanan adalah contoh sikap dan tindakan terhadap suatu perbuatan baik yang dapat ditiru dan diteladani.

10. Data dan Fakta.

Dihadapkan dengan berbagai fenomena yang telah diuraikan pada bab terdahulu, beberapa data dan fakta yang berkaitan dengan masih lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa dalam upaya mendukung pembangunan nasional dapat di deskripsikan sebagai berikut:

a. **Lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa.** indikator lemahnya pemahaman nilai-nilai sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik Kementerian dalam negeri (Kesbangpol Kemendagri) yang menyampaikan bahwa maraknya penyebaran Hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan salah satu indikator bahwa pemahanan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lemah¹⁵, dimana hoax dan ujaran kebencian merupakan penyebab utama dari disintegrasi bangsa selama separuh dekade terakhir. Beberapa data terkait penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang berhasil dihimpun diantaranya adalah sebagai berikut.¹⁶ :

- 1) **Penyebaran Hoax.** Sepanjang tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan sekitar 565.449 konten bermuatan hoax yang tersebar di Media sosial, media online hingga Penyedia layanan Chat/Pesan.

15. www.kesbangpol.kemendagri.go.id_Kesbangpol (2021) Hoax dan ujaran kebencian faktor utama dalam disintegrasi bangsa. diakses pada 16 Maret 2022 Jam 23.22

16. www.kominfo.go.id, Kominfo (2022) Kominfo Blokir 565.449 Konten berisi hoax di media sosial sepanjang 2021. diakses pada 16 Maret 2022 Jam 23.50

Sebaran hoax tersebut berasal dari beberapa platform dengan sebaran sebagai berikut :

a) **Facebook.** Platform Facebook memiliki sebaran hoax sebanyak 35 % yang merupakan platform media sosial yang memiliki sebaran hoax terbanyak, pola sebaran yang dilakukan, sebagaimana yang disebutkan oleh kominfo 25 % memiliki latar belakang pekerjaan di Instansi pemerintah 35 % dari sektor swasta di sektor 20 % Pelajar dan 20% berasal dari *fake account* (akun palsu).

b) **Media massa online.** Dengan kemajuan teknologi informasi dan fasilitas memudahkan untuk membuat sebuah portal berita, saat ini banyak tersebar media massa online yang kerap kali memuat dan menuliskan berita dengan isi hoax, menurut kominfo media massa online memiliki sebaran hoax sebesar 35 %..

c) **Whatsaap.** Platform whatsapp merupakan media yang memfasilitasi seseorang untuk terkoneksi dengan orang lain melalui media persesanan (Chat) maupun telepon, whatsapp juga memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti "Grup Chat" hingga "story" yang mampu dilihat dengan mudah dengan orang lain yang telah terkoneksi, namun salah satu fasilitas whatsapp yaitu "Group Chat" kerap kali disalahgunakan sebagai media penyebar hoax paling efektif, Kominfo menyebutkan bahwa grup chat whatsapp menjadi platform paling efektif dalam tersebarnya hoax sepanjang 2020-2021. Bahkan parahnya hampir 65% pengguna Whatsapp mempercayai berita yang disebarkan melalui grup whatsapp. Platform ini sendiri memiliki sebaran hoax sebanyak 15 %..

d) **Instagram.** Platform Instagram memiliki sebaran hoax sebanyak 15%, berbeda dengan Facebook yang diketahui

latar belakang identitas penyebar hoax, Kominfo tidak merilis latar belakang dari pengunggah hoax yang berasal dari akun Instagram, namun kominfo menyebutkan bahwa hampir 35% penyebar berita hoax di Instagram adalah *Fake account*.

2) **Ujaran kebencian.** Ujaran kebencian memiliki hubungan terkorelasi dengan hoax, dimana hoax yang muncul di berbagai platform juga kerap kali berisi ujaran kebencian, menurut Kominfo yang telah bekerjasama dengan Facebook (Facebook juga menjadi pemilik dari beberapa media sosial lain seperti Instagram dan WhatsApp) yang telah menghapus sebanyak 25.2 juta konten yang mengandung uraian kebencian, dimana hampir sekitar 96.8 % diidentifikasi dengan sistem otomatis berbasis Artificial Intelligent (Kecerdasan buatan, sebagaimana yang dirilis oleh Kompas, beberapa muatan ujaran kebencian yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut¹⁷ :

a) **Pelecehan.** Sebanyak 8.8 juta konten teridentifikasi memuat pelecehan yang ditujukan kepada individu, kelompok hingga institusi.

b) **Kebencian terorganisir.** 9.8 Juta konten teridentifikasi memuat unggahan yang terorganisir untuk menjaruhkan individu, kelompok hingga institusi dengan tujuan tertentu, dalam konteks ini motif unggahan berorientasi kepada isu politik dan pemerintahan.

c) **SARA.** 6.7 Juta konten teridentifikasi memuat unggahan yang menyinggung dan mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan, dalam konteks SARA,

17. www.kompas.com Conney Stephanie (2022) Facebook hapus 25 juta konten ujaran kebencian selama tahun 2021, diakses pada 19 Maret 2022 Jam 20.26

unggahannya juga mengandung unsur pelecehan dan kebencian terorganisir yang memuat isu politik.

b. Lemahnya implementasi nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks lemahnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dapat dikategorikan menjadi beberapa indikator, sebagaimana deskripsi berikut:

1) **Fenomena yang tidak sesuai demokrasi.** Kualitas demokrasi Indonesia dalam separuh dekade terakhir cenderung menurun berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia BPS (Badan Pusat Statistik). Pada tahun 2021, demokrasi Indonesia menghadapi dua masalah: pembatasan kebebasan sipil dan melemahnya oposisi, di mana keanggotaan beberapa partai oposisi di kabinet pemerintah menyebabkan melemahnya *checks and balances* serta fungsi kontrol sosial atas pemerintah, namun data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik menyebutkan beberapa fenomena yang tidak sesuai demokrasi terjadi selama satu dekade terakhir terkait dengan deskripsi sebagai berikut :

a) **Politik Identitas.** Dalam satu dekade terakhir politik identitas menjadi momok tersendiri bagi sistem demokrasi di Indonesia, dimana dalam beberapa kali kontestasi politik Indonesia yang memuncak pada Pemilu 2019, politik identitas menjadi salah satu pemicu dari munculnya polaritas yang didasarkan oleh salah satu identitas tertentu baik identitas Agama, suku maupun golongan tertentu yang menimbulkan *In group-out grup* (kelompok lain yang bukan menjadi bagian dari kelompok sendiri dapat dilawan dan dianggap salah) pada sebuah kontestasi demokrasi di Indonesia, dan dengan kemunculan politik identitas menyebabkan tereduksinya nilai-nilai demokratis yang menjadi asas dan dasar sebuah pemilu.

b) **Money Politik (Politik uang).** Politik uang menjadi salah satu fenomena yang menjadi primadona dalam setiap gelaran pemilu di Indonesia, dan fenomena ini semakin memuncak dalam satu dekade terakhir, fenomena ini selalu memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, sehingga cukup mudah untuk diperalat, berdasarkan data BPS perilaku ini semakin tinggi pada setiap kontestasi politik.

2) **Fenomena yang tidak sesuai persatuan bangsa.** Indikator dari fenomena ini adalah adanya konflik yang didasarkan pada unsur SARA, dimana konflik disebabkan karena mudahnya massa terprovokasi oleh berbagai hal, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

a) **Kerusuhan Fak-fak.** Pada tahun 2019 terjadi kerusuhan yang pecah di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dalam kerusuhan itu, terjadi pembakaran kantor Dewan Adat dan Pasar Thumburuni di Fakfak. penyebab kerusuhan di Fakfak masih merupakan lanjutan dari aksi protes atas rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, dimana sebelumnya beredar luas video hoax yang menunjukkan adanya tindakan rasial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mahasiswa Papua, hal tersebut kemudian dilakukan tindakan "balasan terhadap orang yang bukan asli Papua.

b) **Kerusuhan Wamena.** Pada tahun 2019 terjadi kembali kerusuhan yang terjadi akibat hoax rasisme, kerusuhan wamena disebabkan kabar hoax tentang seorang guru berstatus imigran bukan orang asli Papua yang mengeluarkan kata-kata rasis di sekolah, hoax ini menimbulkan balasan dari pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab dengan membakar dan menghancurkan rumah-rumah pendatang yang berasal dari daerah tertentu, Akibat kerusuhan tersebut, menelan korban jiwa sebanyak 33 orang. Tak hanya itu, 224 mobil roda 6 dan 4 hangus, 150 motor, 465 ruko hangus, dan 165 rumah dibakar.

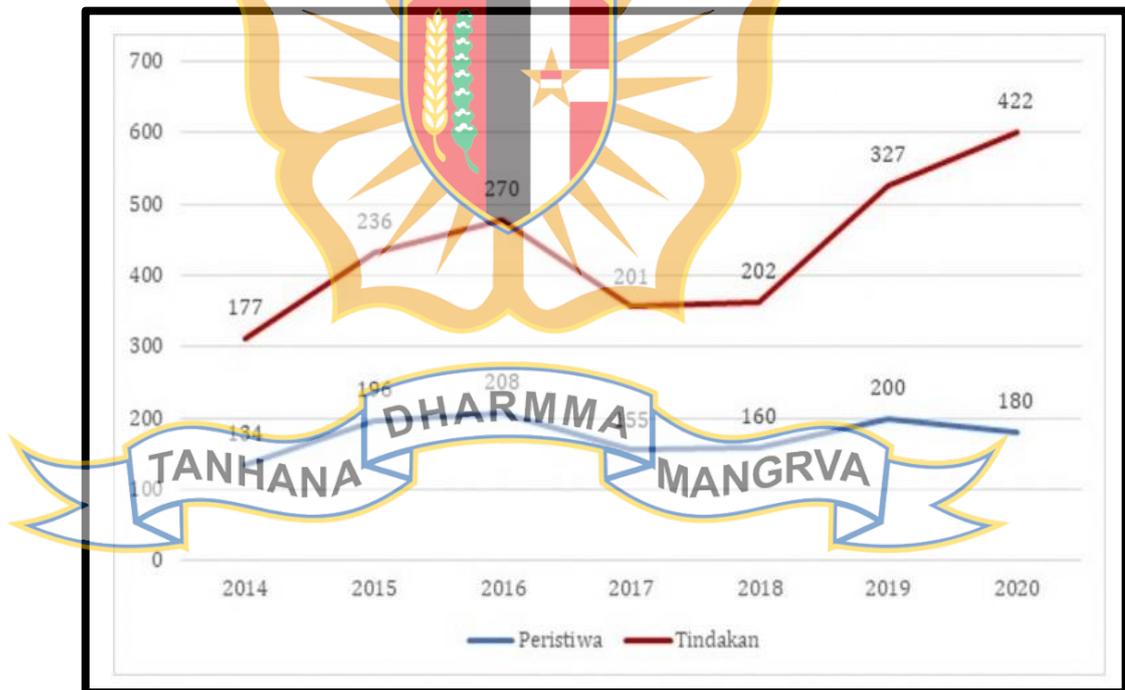
c) **Konflik Politik Identitas Pemilu 2019.** Pemilu 2019 yang mewarnai demokrasi di Indonesia berdampak pada polarisasi sepanjang 2019 hingga tahun 2020, terlebih saat pemilihan Presiden muncul istilah “Cebong” dan “Kampret” yang melabeli pendukung masing-masing calon presiden, istilah ini kemudian menjadi polarisasi besar-besaran khususnya pasca kemenangan salah satu kontestan, kerusuhan terjadi di beberapa wilayah dan mengakibatkan korban jiwa.

d) **Konflik Politik Identitas Pilkada 2020.** Politik identitas masih menjadi salah satu metode kampanye pasca Pilpres 2019, hal ini dibuktikan dengan adanya evolusi istilah yang muncul pada pendukung beberapa calon yang berasal dari golongan partai tertentu, pada masa ini istilah yang muncul adalah “Kadrin” Istilah ini ditujukan kepada pendukung pihak yang berpenampilan “kearab-araban” dan ditujukan pada salah satu ormas keagamaan, dampak dari adanya julukan tersebut menimbulkan konflik di beberapa wilayah yang mengakibatkan korban jiwa.

e) **Konflik Antar Ormas.** Pada tahun 2021 terjadi beberapa konflik antar Ormas (organisasi masyarakat) dan yang paling viral adalah konflik antara Pemuda Pancasila dengan FBR (forum Betawi rempug) di Ciledug Tangerang, konflik ini didasarkan pada kepentingan antar golongan

yang di indikasikan terkait lahan parkir yang dikelola oleh ormas tersebut.

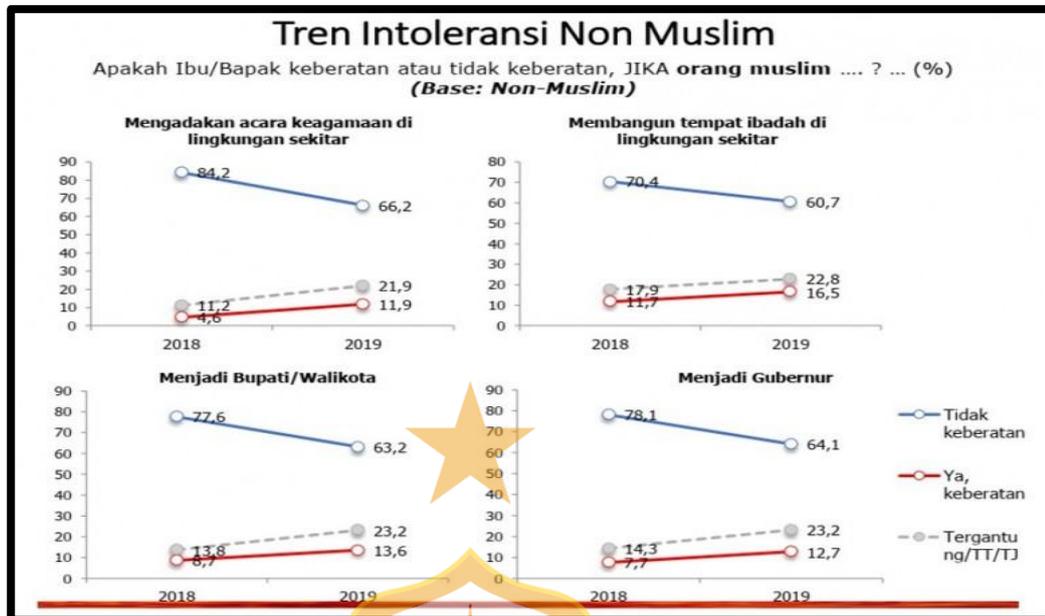
3) **Fenomena yang tidak sesuai Toleransi.** Salah satu penyebab timbulnya konflik maupun pudarnya nilai-nilai kebangsaan salah satunya adalah Intoleransi, Intoleransi adalah kebalikan dari toleransi. Oleh karena itu, perilaku yang tidak sesuai dengan standar yang tertuang dalam empat konsensus bangsa, dimana Intoleransi merupakan sebuah tindakan yang mengancam aspek keragaman yang Indonesia miliki, sehingga pada dasarnya empat konsensus dasar yang merupakan ideologi tengah (moderat) adalah landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia, beberapa data terkait Intoleransi di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Tren Peristiwa dan tindakan Intoleransi di Indonesia

Sumber : SETARA Institute (2021)



Gambar 2.2.

Tren Intoleransi dalam perspektif Agama
Sumber : SETARA Institute (2021)

Berdasarkan visualisasi gambar tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pada gambar 2.1. selama 7 tahun terakhir (2014-2020) indeks tindakan intoleransi meningkat secara signifikan (tanda merah) sedangkan peristiwa intoleransi bersifat fluktuatif (naik-turun) namun memiliki kecenderungan meningkat, sedangkan pada gambar 2.2. berdasarkan data terkait tren intoleransi yang kerap dilakukan kepada kelompok non-muslim, dimana beberapa aspek yang menjadi penyebab munculnya intoleransi terdiri dari aspek pelaksanaan acara keagamaan di lingkungan sekitar, membangun tempat ibadah di lingkungan sekitar dan menjadi kepala daerah.

4) **Fenomena yang tidak sesuai keadilan.** Ketidakadilan masih menjadi salah satu fenomena yang kerap terjadi di negeri ini, dimana ironisnya kerap kali beberapa diantaranya melibatkan aparat dan lembaga negara, beberapa fenomena yang terjadi selama ini diantaranya ketidakadilan dalam proses

hukum. Unsur kesamaan untuk diperlakukan di mata hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum di Indonesia, dimana dalam beberapa kasus masih terjadi tebang pilih dalam proses hukum, seperti perlakuan hukum kepada publik figur yang masih berbeda jika pelaku pelanggaran hukum dari masyarakat biasa, seperti yang terjadi saat pelanggaran proses yang dilakukan oleh publik figur yang sangat berbeda jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat biasa.

c. Rendahnya keteladanan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa. rendahnya keteladanan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa merupakan aspek vital dimana sosok figur panutan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, rendahnya keteladanan dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang muncul justru berasal dari sosok yang idealnya menjadi panutan masyarakat seperti pejabat publik, beberapa data fakta terkait hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) **Penyalahgunaan wewenang.** Beberapa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik selama tahun 2021 diketahui sebagai berikut :

a) Penyalahgunaan wewenang mantan staf khusus kepresidenan dengan bentuk isi surat berkop sekretariat Kabinet yang berisi permohonan/permintaan bagi para Camat untuk melibatkan PT yang memiliki afiliasi dengan stafsus tersebut dalam penanganan Covid-19.

b) Penyalahgunaan wewenang Direktur PT Garuda Indonesia, dalam bentuk penyelundupan suku cadang motor Harley Davidson, dan dua buah sepeda mewah bermerk Brompton, kedua benda tersebut diselundupkan melalui pesawat yang diperintahkan langsung oleh Direktur PT Garuda Indonesia tersebut.

c) Penyalahgunaan wewenang Jaksa di Kejaksaan Agung negeri Manado, dalam bentuk dugaan adanya kerjasama antara oknum jaksa di kejaksaana negeri manado dengan pemerintah Kota Manado terkait perkara pengadaan *Incenenerator* yang tengah ditangani oleh kejaksaan Manado.

2) **Korupsi.** Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sepanjang 2021 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 29.438 Triliun dengan persentase 19 % dalam bentuk gratifikasi, Penyuapan dengan persentase 14.9 %. Penggelapan dalam Jabatan 4.9 %. Perbuatan curang 1.7 % dan pemerasan 0.2 %, KPK menyebutkan persentase tersebut terjadi dari 127 Penyidikan dan 123 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dengan peristiwa menonjol yang melibatkan pejabat publik sebagai berikut¹⁸ :

a) Korupsi benih lobster oleh Menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo yang menyebabkan negara merugi sebesar 5 Milyar rupiah.

b) Korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 oleh Menteri sosial Juliari Batubara yang merugikan negara sebesar 32 Milyar rupiah.

c) Korupsi dana hibah BNPB yang dilakukan oleh Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur yang merugikan negara 3 Milyar.

d) Korupsi pengadaan infrastruktur Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin yang melibatkan jajaran ASN Kabupaten Musi Banyuasin.

18. www.kompas.com. Irfan Kamil (2022) Penindakan Korupsi sepanjang tahun 2021. Diakses pada 16 Mei 2022 Jam 23.12

e) Korupsi pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Gubernur Nurdin Abdullah yang merugikan negara 2 Milyar rupiah.

f) Kasus jual beli jabatan yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari yang melibatkan suaminya yang juga merupakan Bupati Probolinggo periode sebelumnya.

g) Kasus penyuapan pengadaan barang dan jasa di dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim yang menjerat 26 tersangka yang merupakan bagian dari Pemda Muara Enim.

11. Lingkungan Strategis.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa sebagai upaya dalam mendukung pembangunan nasional menghadapi beberapa tantangan dan ancaman yang dipengaruhi oleh lingkungan strategi baik secara global, regional dan nasional, sebagaimana deskripsi berikut:

a. Perkembangan Lingkungan Global.

1) **Konstelasi Geopolitik Global.** Setelah berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 1980-an, terjadi pergeseran sifat konflik internasional dari yang didominasi oleh “konflik eksternal antar negara yang melibatkan negara lain, menjadi didominasi oleh “konflik internal” atau konflik yang terjadi di dalam sebuah negara.”¹⁹ Disamping itu, dalam dekade terakhir, dunia juga mengalami *global multiple crisis* yang meliputi kekurangan pangan, energi, perubahan iklim, krisis keuangan dan ekonomi yang menimbulkan beragam permasalahan dalam bidang politik, keamanan, sosial, budaya dan pembangunan di berbagai belahan Dunia. Mengacu pada fakta tersebut banyak pihak yang berusaha

19. Duffey, T. (2000) Cultural Issues in Contemporary Peacekeeping, International Peacekeeping, Newyork : Harvard Publisher.

tarik menarik dan menyusupkan kepentingannya dalam segala hal termasuk ideologi dan budaya yang menyusup sehingga mengancam nilai-nilai kebangsaan yang ada di NKRI.

2) **Perkembangan Globalisasi.** Perkembangan globalisasi yang merupakan sebuah keniscayaan ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi aspek-aspek kehidupan, globalisasi membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap nilai-nilai dan semangat kebangsaan bangsa Indonesia. Dampak positif yang bangsa Indonesia rasakan dari perkembangan tersebut salah satunya adalah pesatnya pertumbuhan dan perkembangan informasi dan komunikasi, tetapi pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan komunikasi yang muncul tersebut ternyata hal ini juga dapat mengancam nilai-nilai nasionalisme atau kecintaan terhadap negara Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan yang tertuang dalam empat konsensus dasar sebagai filter atau penyaring dari sebuah arus globalisasi agar globalisasi dapat di kendalikan jika dilandasi dengan nilai-nilai dan norma yang terdapat didalam empat konsensus dasar negara.

3) **Perkembangan radikalisme global.** Radikalisme global berkembang menjadi salah satu ideologi transnasional paling mengancam di indonesia, dimana gerakan ini menjadi menganggap pancasila sebagai sesuatu yang tidak ideal dibandingkan ideologi mereka, banyak dari gerakan-gerakan radikalisme global yang berujung pada gerakan anti pancasila, gerakan ini dapat dilihat dari sebuah gerakan yang kerap kali bersembunyi dibalik agama tertentu dengan pola menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. tindakan-tindakan tersebut jika terus dibiarkan tentu akan sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan, dimana ditinjau dari perspektif kewarganegaraan, gerakan radikalisme global merupakan sebuah masalah bagi sistem demokrasi di seluruh dunia termasuk indonesia, dimana ditinjau dari sisi ideologis pada

sistem negara demokrasi pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi pergerakan ideologi radikal.

b. **Perkembangan Lingkungan Regional.**

1) **Kawasan Timur tengah.** Fenomena arab spring di timur tengah berkembang menjadi salah satu gerakan ideologis yang memecah belah hampir semua negara di timur tengah, Arab Spring sendiri merupakan istilah yang mengacu pada gerakan politik yang menggambarkan gelombang gerakan revolusioner di beberapa negara di Timur Tengah sekitar tahun 2011. Fenomena *the Arab Spring* yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah berdampak secara politik, sosial dan ekonomi. kondisi masyarakat internasional dan mempengaruhi negara lain, termasuk di Indonesia yang beberapa kali terdapat gerakan yang berafiliasi dan terinspirasi dari fenomena arab spring di timur tengah seperti perkembangan hoax bernuansa SARA yang menjadi ciri khas gerakan Arab Spring, pada fenomena Arab Spring sendiri, Media sosial telah terbukti menjadi alat utama yang dikendalikan oleh beberapa kelompok untuk memobilisasi setiap protes mereka terhadap pemerintah dengan menentukan apa yang dianggap tepat dan pada waktu mana semua peserta demonstrasi diizinkan untuk berpartisipasi. Bahkan, mereka bisa dengan cermat menentukan berapa banyak pengunjung rasa yang akan mereka mobilisasi di setiap daerah untuk melawan pemerintah. Media sosial kemudian menjadi incaran pemerintah selama pemberontakan rakyat di beberapa negara di Timur Tengah, namun tindakan represif dari pemerintah justru semakin membuat gelombang demonstrasi meninggi dan menjatuhkan negara-negara tersebut, salah satu bentuk penggunaan cara-cara seperti itu adalah pada Pemilu 2019 khususnya saat pemilihan presiden yang secara terang-terangan terjadi mobilisasi dimana-mana dengan dalih agama dan kesukuan sehingga timbul polarisasi yang mengancam nilai-nilai kebangsaan.

2) **Kawasan Pasifik.** Kemunculan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) di wilayah pasifik berdampak pada bangkitnya gerakan-gerakan separatisme di Papua yang selalu memunculkan isu-isu ras di dalamnya, *MSG* sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia, beberapa anggota *MSG* seperti Vanuatu menjadi salah satu negara yang vocal dan menganggap orang Papua sebagai ras Melanesia yang tidak bisa tunduk dan tinggal di Indonesia, mereka menganggap Papua merupakan salah satu wilayah Melanesia yang dijajah oleh Indonesia, hal ini kemudian memancing reaksi masyarakat Papua yang pro kemerdekaan seperti OPM (organisasi Papua merdeka) dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) untuk bereaksi di Papua, dimana salah satu bentuk pengaruh dari Vanuatu dan beberapa negara *MSG* adalah beberapa kerusuhan yang berujung SARA di wilayah Papua, hal ini tentu menjadi salah satu tantangan dan kendala dalam upaya implementasi nilai-nilai kebangsaan yang mulai runtuh dan berbalik menjadi separatis di wilayah Papua.

c. **Pengaruh Perkembangan Nasional.**

1) Geografi²⁰. Indonesia memiliki kurang lebih 17.499 pulau sehingga merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia. Indonesia secara geografis terletak di 06° 08' LU-11° 15' LS dan 94° 45' BT dengan dengan luas daratan 1.922.570 Km² dengan luas perairan 7.757.483 Km². Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan 10 negara dimana belum seluruh perbatasan tersebut terselesaikan dengan tuntas. Sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya ketegangan maupun konflik berkaitan dengan sengketa perbatasan. Disamping itu, dengan letaknya yang strategis di jalur utama perdagangan dunia, menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam dunia internasional baik di bidang politik, bidang

20. www.pvmbg.org. PVMBG (2020) rencana nasional penanggulangan bencana dan demografi di Indonesia, diakses pada 21 April 2022 Jam 19.30

ekonomi maupun bidang pertahanan. Namun peluang ini juga rentan terhadap beragam kerawanan, antara lain seperti isu ancaman keamanan baru non tradisional (*non traditional security issues*) meliputi ; isu-isu terorisme (terrorism), perompakan dan pembajakan bersenjata di laut (*piracy and arms robbery at sea*) penyelundupan senjata (*small weapons/ arms smuggling*), penyelundupan orang (*people smuggling*), hampir kesemuanya merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Hal tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas dan konflik dalam lingkup nasional sehingga membahayakan Integrasi nasional, terlebih pelaku kerap kali menyusupi isu-isu agama dan kesukuan dalam menjalankan aksinya.

2) Demografi. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, dan memiliki bonus demografi yang sangat potensial sebagai Sumber Daya Manusia, selain jumlah yang begitu besar, terdapat pula beberapa kerawanan berkaitan dengan begitu majemuknya suku bangsa, bahasa dan budaya yang dimiliki Indonesia serta kurang meratanya penyebaran penduduk di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya kerawanan-kerawanan akan terjadinya konflik sosial akibat isu-isu SARA. Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia juga masih belum optimal. Masih terjadi kesenjangan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia, sehingga SDM Indonesia justru dalam beberapa kasus berpeluang terpapar paham radikal dan menjadi salah satu ancaman besar bagi nilai-nilai kebangsaan.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki sumber kekayaan alam (SKA) yang sangat melimpah di duni, hal tersebut mengacu pada data yang disebutkan Asosiasi Pertambangan Indonesia bahwa negara Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia dalam daftar negara yang memiliki kekayaan sumber daya mineral yang berlimpah. Mulai dari emas, nikel, batu bara, minyak dan gas bumi sangat

dapat menunjang perekonomian Indonesia jika dikelola dengan baik oleh masyarakat Indonesia sendiri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara asing, karena disparitas kualitas SDM dan teknologi yang belum mampu menggunakan sumber daya alam tersebut, Inilah salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya di sektor industri. Bagaimana mengelola Sumber Daya Alam (SDA) kita tanpa ada campur tangan dari warga Negara asing. Pengelolaan sumber daya alam sangat penting dilakukan oleh SDM Indonesia sendiri agar proses pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan kemakmuran dan pembangunan tanpa mengurangi dampak atau menguras sumber daya alam bagi generasi mendatang. Perlu diingat bahwa untuk menguasai SDA, SDM Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kualifikasi manajemen yang profesional dan memiliki kualitas yang luhur untuk mengelola sumber daya alam untuk generasi mendatang.

4) Ideologi. Ideologi Pancasila sebagai ideologi moderat terletak di antara daya tarik beberapa ideologi besar yang sangat dipengaruhi oleh tren globalisasi dan penyajian nilai-nilai transnasional, antara lain ideologi lain berupa sekularisme, liberalisme, radikalisme, kapitalisme, komunisme, pemerintahan khilafah dan hegemoni. Partisanisme dalam mekanismenya mempengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat melalui proses berinteraksi dan terlibat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ideologi Pancasila. Keadaan ini mempengaruhi anggota masyarakat atau warga tertentu untuk memiliki realisasi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bersama yang dianut oleh ideologi Pancasila, ideologi negara. Meskipun hanya sebagian kecil dari praktik pola pikir, sikap dan pola perilaku anak nasional tidak selaras dengan nilai-nilai bersama dalam konteks Indonesia, yang

dapat berdampak dan mengganggu kohesi dan persatuan bangsa (Silitonga, 2020).

5) Politik. Dalam satu dekade terakhir politik di Indonesia berkembang menjadi politik identitas, politik identitas berkembang, dan kerap memunculkan “*local hero*” yang membawa sebuah identitas tertentu, adanya kesenjangan kemudian berdampak pada mudahnya masyarakat untuk mau mengikuti seseorang yang menjanjikan kesejahteraan, Intisari Politik identitas pada dasarnya adalah upaya dan Cara termudah untuk mempengaruhi masyarakat adalah dengan mematahkan kembali identitas aslinya, Jika ditelaah lebih jauh, politik identitas secara umum merujuk pada subset politik di mana sekelompok orang dengan identitas yang sama berusaha untuk memajukan kepentingan suatu kelompok atau bahkan kepentingan khusus mereka. Perkembangan politik identitas tentu saja menjadi salah satu ancaman. dalam upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

6) Ekonomi. Krisis ekonomi global yang masih berlanjut sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian nasional. Sehingga mengakibatkan kesenjangan ekonomi. kesenjangan ekonomi yang tinggi cenderung membuat politik identitas berkembang dan berevolusi menjadi konflik SARA. Terlebih di Indonesia memiliki jejak historis yang cukup buruk terkait hubungan antara kesenjangan ekonomi dengan konflik SARA seperti konflik sampit dan sambas yang didasarkan pada permasalahan ekonomi dari program transmigrasi.

7) Sosial Budaya. Kondisi sosial budaya di Indonesia cukup mengalami perubahan yang signifikan, terlebih sejak kemunculan politik identitas dalam beberapa kontestasi politik di Indonesia yang menghilangkan karakteristik sosial budaya di Indonesia, hal tersebut disebabkan politik identitas merupakan sebuah gerakan mempolitisasi sebuah identitas pada sebuah wilayah, yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang

merasa sama, baik secara ras, etnis, agama ataupun golongan lainnya, terlebih dengan menggunakan sarana media sosial, maka isu SARA berkembang secara pesat dalam merubah mindset sosial budaya di Indonesia yang mengancam nilai-nilai kebangsaan.

8) Pertahanan Keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir pasca berkembangnya politik identitas, konflik yang disebabkan oleh isu SARA menjadi opsi bagi masyarakat dalam melakukan sebuah konflik, terlebih Konflik SARA adalah sebuah pertentangan yang menghasilkan sebuah konflik di masyarakat, konflik ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya gesekan yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan dan latar belakang dari masyarakat. Konflik bernuansa SARA sendiri dapat dengan mudah berkobar di negara atau wilayah yang heterogen, dimana dalam konflik SARA beberapa individu dan kelompok percaya bahwa ras, suku, atau keyakinan merekalah yang paling benar. Dengan demikian menjelek-jelekkan ras, ajaran etnis dan pemeluk agama lain. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik antar individu tersebut. Konflik akan semakin luas karena akan ada banyak pengikut dari keyakinan yang sama yang berpartisipasi di dalamnya, isu SARA menjadi hal yang sensitif dan mudah memicu perselisihan yang mengancam Hankam, salah satunya adalah konflik dan kerusuhan di Wamena yang disebabkan hoax yang terjadi pada mahasiswa di Surabaya yang berdampak pada sweeping kepada warga yang bukan asli Papua di Wamena, dimana kerusuhan Papua menjadi salah satu indikator bahwa degradasi nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai toleransi menjadi salah satu hal yang mengancam pertahanan dan keamanan

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum.

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan adalah upaya sosialisasi, internalisasi dan pelembagaan yang sistematis dan terukur yang dilakukan dengan mekanisme aktif pendidikan dan pelatihan dua arah, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman, pemahaman dan implementasi konsep-konsep membangun keberanian bangsa dan membangun sistem kenegaraan yang bersifat sustainable, sehingga rantai pewarisan nilai-nilai bersama tidak terputus. Pada dasarnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu bentuk dari pendidikan kewarganegaraan (*civics education*) dalam rangka pembentukan karakter/jati-diri bangsa (*nation character building*).

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan mempunyai peranan strategis dalam membentuk kesadaran dalam membangun jati-diri yang kuat sebagai bangsa dan mempunyai kesadaran terhadap sistem kenegaraan yang dicita-citakan dan disepakati bersama, namun berdasarkan fakta di lapangan, dengan masih maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang melibatkan komponen bangsa menandakan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen-komponen bangsa telah memudar bahkan dalam beberapa kasus terjadi di lembaga negara. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan pisau analisis teori peran, teori integrasi, teori pemahaman, teori implementasi dan teori keteladanan.

13. Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Komponen Bangsa Guna Mendukung Pembangunan Nasional.

Pembangunan nasional akan berhasil mencapai sasaran manakala dikelola oleh SDM yang berkualitas dan berkarakter sesuai nilai-nilai empat konsensus dasar bangsa sebagai bagian dari proses pembangunan karakter bangsa, pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa (Pancasila, UUD 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia), dimana hal tersebut

merupakan proses panjang, dan perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sebagai upaya dalam meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dengan pemahaman nilai-nilai tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Esensi pemahaman nilai-nilai kebangsaan

No	Sumber	Esensi nilai-nilai	Kristalisasi nilai-nilai
1	Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Religius 2. Nilai kekeluargaan 3. Nilai keselarasan 4. Nilai kerakyatan 5. Nilai keadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuhanan 2. Kemanusiaan 3. Persatuan 4. Demokrasi 5. Keadilan
2	UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demokrasi 2. Kesamaan derajat 3. Ketaatan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pluralis & Multikulturalis 7. Patriotis
3	NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesatuan wilayah 2. Persatuan bangsa 3. Kemandirian 	
4	Sesanti Bhineka Tunggal Ika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toleransi 2. Keadilan 3. Gotong Royong 	

Sumber : Hasil Kajian Ke deputian Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan, 2021.

Tabel 3.1. merupakan deskripsi esensi dari pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pedoman dalam pembangunan nasional Indonesia, sebagai salah satu tujuan dari pemahaman nilai-nilai tersebut, dimana jika dikorelasikan dengan teori Pemahaman sebagaimana yang disebutkan oleh Widiasworo (2017) pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan dan mengasosiasikan informasi yang didapatkan dan dipelajari menjadi sebuah kesatuan, sedangkan dalam perspektif lain, Menurut

Sudjiono (2011) pemahaman (*Comprehension*) adalah sebuah kemampuan untuk mengerti dan memahami sesuatu, pemahaman juga merupakan salah satu bentuk hasil belajar yang di alami oleh manusia, dengan kata lain terjadinya sebuah pemahaman adalah terbentuk akibat adanya proses belajar dan beradaptasi dari hasil belajar tersebut.

Namun dikorelasikan antara teori pemahaman dengan esensi pemahaman nilai-nilai kebangsaan sebagaimana yang disebutkan oleh pusat pendidikan pancasila dan konstitusi RI berbanding terbalik dengan fakta bahwa penyebaran Hoax dan ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial di Indonesia masih sangat tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan penyebaran hoax. Sepanjang tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan sekitar 565.449 konten bermuatan hoax yang tersebar di Media sosial, media online hingga Penyedia layanan Chat/Pesan.

Sebaran hoax yang juga melibatkan komponen-komponen bangsa dalam penyebarannya di media sosial, juga ujaran kebencian. Ujaran kebencian memiliki hubungan terkorelasi dengan hoax, dimana hoax yang muncul di berbagai platform juga kerap kali berisi ujaran kebencian, menurut Kominfo yang telah bekerjasama dengan Facebook (*Facebook* juga menjadi pemilik dari beberapa media sosial lain seperti Instagram dan Whatsaap), sehingga melemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan akan berdampak pada Integrasi bangsa.

Menurut Linton (1984), Integrasi adalah proses pembangunan selangkah demi selangkah yang bertujuan untuk mencapai perpaduan sempurna antara komponen-komponen suatu negara untuk bersama-sama menciptakan budaya universal (totalitas budaya) yang merupakan identitas unik suatu bangsa dan negara²¹ Kemudian dalam perspektif Soemarjan (1980) menyebutkan bahwa Inklusi sosial sebagai bentuk integrasi dapat tercapai jika ada ketergantungan antar bagian atau elemen masyarakat. Kondisi ini akan membangkitkan kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan dalam masyarakat. Dimana terdapat beberapa syarat agar tercapainya sebuah

21. Ralph Linton, Antropologi; Suatu Penyelidikan Tentang Manusia (Bandung: Jemmars, 1984)

integrasi yaitu pertama terdapat anggota masyarakat yang saling mengisi. Kedua adanya kesepakatan atau konsensus bersama yang berkaitan dengan norma dan nilai. Ketiga Pelaksanaan nilai dan norma secara konsisten dalam sebuah masyarakat²².

Mengacu pada landasan teori tersebut sebagai indikator dalam sebuah pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa, dalam konteks ini komponen bangsa dapat didefinisikan dalam konteks historis sebagai komponen-komponen pembentuk negara dan komponen yang terlibat dalam kesepakatan bentuk dan ideologi negara seperti dari komponen agama, komponen nasionalis dan komponen Hankam yang diaktualisasikan menjadi beberapa lembaga, seperti Lembaga negara, yang merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan *Civilized Organization*, dengan deskripsi sebagai berikut.

- a. **Kondisi Integrasi akibat lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa.** terkait dengan kondisi dalam beberapa tahun kebelakang, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kominfo, diketahui beberapa temuan dari lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan sebagai akibat dari lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa yang ditemukan dari beberapa lembaga, dimana dapat dilihat dari laporan peristiwa, fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan dari beberapa lembaga negara tersebut, sebagaimana laporan pada tabel berikut.



22. Soemardjan, Selo (1980) kemiskinan struktural suatu bunga rampai, Jakarta : Yayasan ilmu sosial.

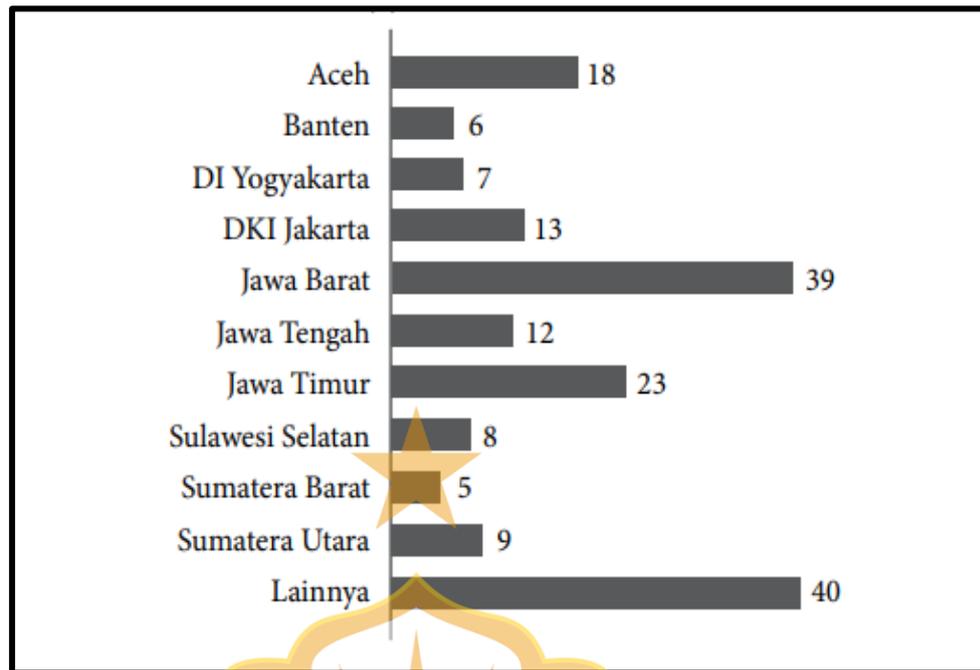
Tabel 3.2.

Data tindakan intoleransi & radikalisme pada lembaga negara

No	Tahun	Jenis pelanggaran	Jumlah Aduan
1.	2019	1. Intoleransi 2. Anti-Pancasila 3. Anti-NKRI 4. Radikalisme	1. Intoleransi 35 aduan 2. Anti-Pancasila 5 Aduan 3. Anti-NKRI 27 laporan 4. Radikalisme 16
2.	2020	1. Intoleransi 2. Anti-Pancasila 3. Anti-NKRI 4. Radikalisme	1. Intoleransi 25 aduan 2. Anti-Pancasila 5 aduan 3. Anti-NKRI 24 aduan 4. Radikalisme 10 aduan
3.	2021	1. Intoleransi 2. Anti-Pancasila 3. Anti-NKRI 4. Radikalisme	1. Intoleransi 15 aduan 2. Anti-Pancasila 0 aduan 3. Anti-NKRI 5 aduan 4. Radikalisme 15 aduan

Sumber : Kominfo & aduasn.id (2021)

Tabel 3.1 tersebut merupakan data hasil reduksi dari rilis yang dikeluarkan oleh kominfo dengan sumber yang berasal dari aduasn.id yang merupakan platform aduan bagi ASN (aparatur sipil negara) yang berada dalam lingkup lembaga negara, termasuk di dalamnya melingkupi beberapa kementerian, dimana laporan tersebut merupakan sebuah aplikasi pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengawasi kinerja ASN dalam lingkup kementerian negara, berdasarkan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa lembaga negara menjadi salah satu sasaran potensial bagi penyebaran paham anti Pancasila dan radikalisme, dan dapat diasumsikan dengan adanya oknum ASN yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan integrasi nasional dalam lingkup lembaga negara belum optimal. kemudian dalam aspek lembaga masyarakat, diketahui beberapa temuan dan hasil analisa sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.1.

10 besar provinsi dengan dengan pelanggaran toleransi di Indonesia

Sumber: Setara Institute, 2021

Berdasarkan gambar 3.1 dapat diinterpretasikan bahwa beberapa tindakan intoleransi yang dilakukan masyarakat, pelanggaran tertinggi tersebar di sepuluh provinsi dengan provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan indikator dan jumlah pelanggaran tertinggi (39 indikator dan jumlah pelanggaran), dari 10 provinsi tertinggi terjadinya intoleransi tersebut mayoritas terdiri dari provinsi-provinsi besar yang memiliki heterogenitas tinggi, dan terdapat sebelas jenis tindakan yang menjadi salah satu tindakan pelanggaran toleransi tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan tindakan diskriminasi menjadi salah satu tindakan paling banyak dilakukan. Berdasarkan data tersebut dapat di asumsikan bahwa pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh masyarakat masih tergolong dibawah rata-rata, kemudian dalam aspek komponen bangsa yang berasal dari unsur agama, terdapat beberapa lembaga dengan unsur agama yang terpapar radikalisme dan terindikasi melakukan tindakan-tindakan intoleran.

b. Pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa sebagai upaya mereduksi dis-integrasi bangsa. Lemahnya pemahaman nilai kebangsaan pada komponen bangsa sebagaimana yang telah di deskripsikan pada pasal sebelumnya menimbulkan sebuah proses sosial bernama Dis-Integrasi Bangsa, indikator terjadinya Dis-Integrasi Bangsa, secara gamblang dijelaskan oleh Linton (1984) dan Soemarjan (1980), sehingga beberapa upaya untuk meningkatkan pemahaman nilai nilai kebangsaan pada komponen bangsa melalui pertama Keterpaduan dan kesinambungan sumber pemahaman, kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi dan ketiga pemahaman bahwa nilai nilai kebangsaan selaras dengan Agama, yang dilaksanakan dengan implementasi tindakan sebagai berikut:

1) Keterpaduan dan kesinambungan sumber pemahaman dimaksudkan adanya keterpaduan program kerja antara K/L dengan organisasi lain terkait sebagai sumber yang memberikan pemahaman dan dilakukan secara kesinambungan setiap tahunnya dengan memasukan kedalam program kerja yang terpadu, dengan tindakan yang dapat dilakukan di lapangan yaitu:

a) Melaksanakan pengawasan dan menyusun indikator terpadu dari pelaksanaan pemahaman nilai nilai kebangsaan pada komponen-komponen bangsa

b) Penyediaan anggaran yang berkelanjutan dengan spending mandatori pada komponen-komponen bangsa

c) Secara periodik melaksanakan koordinasi dan konsolidasi terkait materi pemahaman nilai nilai kebangsaan.

2) Pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi, dengan tindakan yang dapat dilakukan di lapangan yaitu:

a) Memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyebarkan Konten nilai nilai kebangsaan

- b) Memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyelenggarakan Lomba dengan tema ke arah pemahaman nilai-nilai kebangsaan
 - c) Memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam Memfilter narasi narasi yang tidak baik dan berpotensi menimbulkan dis-integrasi.
- 3) Pemahaman bahwa nilai nilai kebangsaan selaras dengan Agama, dengan tindakan yang dapat dilakukan di lapangan yaitu:
- a) Melakukan pendataan terhadap tokoh-tokoh agama melalui organisasi/asosiasi keagamaan untuk diberi misi memberikan pemahaman nilai nilai kebangsaan, hal ini dapat dilakukan kerjasama dengan ormas keagamaan yang memiliki massa banyak dan dapat dimanfaatkan sebagai SDM dalam memobilisasi.
 - b) Menciptakan Momentum peristiwa yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan seperti dalam aktifitas-aktifitas keagamaan dalam momen hari besar.
 - c) Mengintensifkan pelaksanaan Doa kepada bangsa yang selalu di panjatkan, hal ini dapat juga di intensifkan melalui khutbah jumat sehingga kesatuan dapat tercipta.

14. Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Komponen Bangsa Guna Mendukung Pembangunan Nasional.

Nilai-nilai kebangsaan suatu negara pada dasarnya memegang peranan penting dalam merespon perkembangan zaman, karena nilai-nilai dasar kebangsaan dapat ditingkatkan melalui kehidupan warga negara Indonesia. khususnya ideologi kehidupan bangsa, pada dasarnya dapat memberikan orientasi dan arahan normatif dalam segala bidang kehidupan bangsa, dan dikorelasikan dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional di Indonesia, Padahal implementasi nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu aspek penting

dalam pembangunan nasional, hal tersebut disebutkan oleh Purwanto dan Sulistyatuti (1991) yang menyebutkan bahwa Implementasi adalah sebuah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan tersistematis, Purwanto dan Sulistyatuti (1991) juga menyebutkan bahwa implementasi memiliki inti makna sebagai sebuah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*delivery of Policy output*), implementasi ini dilakukan oleh sesuatu yang disebut sebagai implementator kepada kelompok sasaran yang disebut sebagai “*target group*” yang juga merupakan untuk mewujudkan kebijakan, mengacu pada beberapa uraian tersebut, dapat disintesis bahwa Implementasi adalah bermuara pada sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.

Dikorelasikan dengan temuan di lapangan, Implementasi nilai-nilai kebangsaan idealnya adalah sebuah kondisi dimana adanya kesesuaian perilaku di masyarakat yang sesuai dengan demokrasi, perilaku yang mencerminkan persatuan bangsa, adanya toleransi yang tinggi di masyarakat dan adanya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, namun fakta menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, seperti adanya fenomena yang tidak sesuai demokrasi, kualitas demokrasi Indonesia pada beberapa tahun terakhir cenderung memiliki penurunan berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik. pada 2021, demokrasi Indonesia dihadapkan pada dua isu pembatasan kebebasan sipil dengan kemunculan Politik Identitas dan *Money Politik* (Politik uang).

Sedangkan pada aspek fenomena yang tidak sesuai persatuan bangsa. Indikator dari fenomena ini adalah adanya konflik yang didasarkan pada unsur SARA, dimana konflik disebabkan karena mudahnya massa terprovokasi seperti masih terjadinya Konflik Politik Identitas Pemilu 2019 hingga Kerusuhan berbalut SARA, dan pada Fenomena yang tidak sesuai Toleransi. Salah satu penyebab timbulnya konflik maupun pudarnya nilai-nilai kebangsaan salah satunya adalah Intoleransi, dimana menurut BPS tingkat toleransi indonesia cenderung menurun setiap tahunnya, dan pada aspek fenomena yang tidak sesuai keadilan. Ketidakadilan masih menjadi salah satu fenomena yang kerap terjadi di negeri ini, dimana ironisnya kerap kali beberapa diantaranya melibatkan aparat dan lembaga negara, beberapa

fenomena yang terjadi selama ini diantaranya ketidakadilan dalam proses hukum, sehingga berdasarkan uraian tersebut sistem yang dikehendaki oleh negara belum berjalan sebagaimana kondisi idealnya.

Dalam konteks sistem sebagaimana teori implementasi yang disebutkan oleh Purwanto dan Sulistyatuti (1991) dikorelasikan dengan negara maka implementasi nilai-nilai kebangsaan adalah merupakan *national building system* sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang memiliki makna mengembangkan dan meningkatkan fungsi keseluruhan suatu negara. Pada dasarnya, setiap negara, baik yang sedang berkembang maupun yang modern, senantiasa meningkatkan kemampuan operasionalnya. Setiap negara akan terus berproses, berubah dan beradaptasi dengan waktu dan keadaan, baik domestik maupun internasional. Dalam proses pembangunan nasional, pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang mendukung terwujudnya kemajuan suatu bangsa dan negara (*national building*). Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, implementasi tersebut dapat di deskripsikan sebagaimana penjelasan berikut :

- a. **Konsep *national building* dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional.** Pembangunan bangsa sebagai sebuah bentuk *national building* pada sebuah bangsa adalah salah satu proses dimana sekelompok manusia yang memiliki perbedaan latar belakang (baik ras suku dan agama) memutuskan untuk bersatu dan melebur menjadi sebuah identitas baru bernama "bangsa" dimana dikorelasikan dengan Indonesia, peleburan atas berbagai latar belakang yang berbeda tengah menghadapi beberapa persoalan yang menyebabkan proses *national building* yang tengah di bangun terkendala beberapa persoalan seperti masuknya ideologi asing dan terpengaruhnya SDM Indonesia kedalam ideologi radikal yang justru bersifat destruktif. *national building* memiliki irisan dengan terbentuknya sebuah bangsa, dimana terbentuknya sebuah bangsa, kemudian dilanjutkan dengan terbentuknya sebuah negara independent yang diakui atau *state building*, dan pada akhirnya Indonesia pada tahap program

pengembangan negara untuk menjadi sebuah negara maju (*developing program*). Namun dikorelasikan dengan kondisi di Indonesia, Implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional di Indonesia, berdasarkan fakta dan hasil analisa terdapat beberapa penyebab dan kendala dalam penerapannya pada komponen bangsa, dan beberapa kendala besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam Implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) **Lemahnya *national building* akibat ideologi transnasional berbalut agama.** Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini adalah kerap kali terjadi adanya pertentangan kepada nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dengan dalih Agama. Implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa dalam satu dekade terakhir mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk menentang nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki Indonesia saat ini, dalih agama cukup mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, padahal dalam konsep dan teori *national building*, nilai kebangsaan yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan konsensus atau kesepakatan bersama antar komponen bangsa yang terdiri dari Nasionalis dan Agamis, padahal pilar kebangsaan Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Bhineka tunggal ika dan NKRI dilahirkan oleh para pendiri bangsa (*The founding father*) yang sebagian besar dari mereka adalah pada ulama dan tokoh besar Islam di Indonesia seperti K.H.Wahid Hasyim, H.Agus Salim, Muhammad Natsir, K.H. Mas Mansyur, Namun pasca Globalisasi yang terjadi, perkembangan Islam radikal mencapai puncaknya hingga kemunculan beberapa organisasi-organisasi terselubung yang menentang Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan beberapa tahun yang lalu, menurut data BNPT, ideologi yang di usung oleh HTI hampir sama dengan beberapa

kelompok/gerakan teroris terafiliasi gerakann teroris seperti ISIS dan JI yang terdeteksi di Indonesia, beberapa pertentangan antara Agama dan Pancasila yang kerap kali dijadikan senjata oleh kelompok ini²³.

2) **Lemahnya *national building* akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan**, indikator dari lemahnya *National Building* dalam aspek tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Intensitas pembelajaran/pelatihan nilai nilai kebangsaan selama paska reformasi menurun yang mengakibatkan kurangnya wawasan kebangsaan di kalangan komponen bangsa
- b) Isi pelatihan dan metode pelatihan/pembelajaran kurang efektif dan menarik belum sepenuhnya kekinian.
- c) Sumber-sumber otentik sejarah masih sulit diakses sehingga masih ada keraguan terhadap sejarah
- d) Pada umumnya Kementerian Lembaga melaksanakan sosialisasi nilai nilai kebangsaan masih kurang terencana terstruktur dan terkoordinasi serta bersifat superfisial, kompartementalis,
- e) Lemahnya daya nalar dan kritis masyarakat sejalan dengan masih dangkalnya literasi masyarakat .
- f) Pengembangan secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin belum sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan nilai nilai kebangsaan.

b. Konsep *national building* sebagai upaya dalam Implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung

23. www.kalimahsahwa.id Kalimahsahwa (2020) bagaimana “wacana pancasila” menurut HTI? Diakses dari pada 17 April 2022 Jam 20.21

pembangunan nasional. Untuk menghadapi ancaman sebagaimana yang dijelaskan pada pasal sebelumnya tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh komponen bangsa dalam menjaga dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan uraian sebagai berikut:

1) **Pertama,** implementasi nilai-nilai kebangsaan perlu mantapkan dengan pendekatan budaya. Berbagai komponen bangsa melalui Pemerintah hingga kementerian jajarannya harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat, sehingga nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat terserap dengan optimal dan bahkan dapat fleksibel bahkan dengan golongan manapun baik adat ataupun agama, mengingat budaya merupakan refleksi dari adat dan agama.

2) **Kedua,** Internalisasi nilai dalam pendidikan karakter. Internalisasi dapat dilakukan dengan cara para peserta didik mengalami situasi tertentu yang dapat menggugah dari pemahaman menjadi perilaku. Peserta didik di programkan untuk benar benar merasakan dan memahami dengan terlibat langsung dalam kegiatan nyata bersentuhan langsung dengan masyarakat dan komunitas tertentu, Kegiatan tersebut antara lain menjadi pekerja sukarela dalam kegiatan sosial, pendidikan dan terjun langsung dalam komunitas agama dan komunitas olah raga serta terlibat dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Kegiatan lain adalah menyangkut ketrampilan global dengan upaya melindungi diri, orang lain dan karya pihak lain di dunia nyata dan dunia maya melalui penguasaan tentang etika dan akuntabilitas.

3) **Ketiga**, penegakan hukum. Nilai-nilai kebangsaan sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Indonesia telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, sehingga dengan ketegasan hukum maka para pelanggar dan radikalisme akan berpikir berkali-kali dalam menyebarkan ajarannya di Indonesia.

4) **Keempat**. Penguatan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai kebangsaan diimplementasikan oleh komponen bangsa secara bertahap dan berlanjut, melalui peran lembaga negara dan pendekatan sosial budaya dengan deskripsi sebagai berikut:

a) Pelembagaan nilai-nilai kebangsaan. dengan memperkuat pelembagaan nilai-nilai kebangsaan dalam kelembagaan sosial-politik, ekonomi dan budaya, dengan meningkatkan koherensi dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan, mereduksi berkembangnya bentuk-bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus bangsa pada kalangan penyelenggara negara.

b) Pembelajaran orang dewasa dengan memberikan materi secara *sustainable* (berkelanjutan) kepada lembaga dan institusi baik sektor privat maupun publik (pekerja) sehingga pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang berasal dari 4 konsensus dasar bangsa tidak berhenti saat pendidikan formal saja namun masih tetap berjalan saat memasuki dunia kerja.

c) Peran Lembaga pemerintah, merevitalisasi lembaga pemerintah sebagai agen sosialisasi nilai-nilai kebangsaan

d) Mengembangkan dan membangun roadmap Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang menyenangkan dikalangan milenial.

15. Memaksimalkan Keteladanan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Komponen Bangsa Guna Mendukung Pembangunan Nasional.

Dalam diskursus terkait dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan, salah satu permasalahan yang mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah adanya krisis keteladanan. Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul *Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan* (2014) mengatakan ada keluhan panjang dan luas tentang krisis keteladanan dan nilai-nilai kebangsaan yang di anut oleh bangsa Indonesia saat ini. Nilai-nilai kebangsaan selain bersifat inspiratif, aplikatif, juga berfungsi sebagai sumber keteladanan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan saat ini masih sebatas seremonial saja, bahkan dijadikan sebagai alat kekuasaan²⁴.

Dikorelasikan dengan aspek teoritis, Keteladanan sebagaimana yang disampaikan oleh Hasbullah (1999) memiliki dasar makna teladan yang memiliki makna perbuatan yang dapat ditiru atau dicontoh, yang berarti jika dalam konteks keteladanan maka sesuatu hal yang dapat ditiru atau dicontoh, Hasbullah (1999) juga menyebutkan bahwa keteladanan adalah merupakan sebuah proses yang dapat dibentuk, Hasbullah (1999) menyebutkan bahwa keteladanan merupakan sebuah perilaku yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan dan dijadikan contoh bagi orang yang mengamati dan melihatnya, pada umumnya keteladanan ini berupa contoh tentang sikap dan perbuatan yang mengarah pada perbuatan baik yang dapat ditiru.

Dalam konteks tersebut keteladanan biasanya diarahkan dan melekat kepada simbol-simbol di dalam masyarakat yang kemudian dapat menjadi sosok panutan dan dihormati, dalam konteks Indonesia, Hasbullah (1999) menyebutkan contoh-contoh tersebut dapat berupa symbol kepemimpinan maupun kewenangan seseorang yang berada dalam masyarakat. namun symbol-simbol tersebut nyatanya telah mengalami degradasi mengingat

24. Latif, Yudi (2014) mata air keteladanan, Pancasila dalam perbuatan, Jakarta ; penerbit Mizan.

banyaknya symbol masyarakat seperti pejabat publik yang tidak memberikan contoh keteladanan dan justru melakukan pelanggaran, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.

Tindakan korupsi oleh pejabat Publik selama 2021

No	Pelaku	Persentase	Bentuk
1	Menteri	1 %	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuapan • Gratifikasi
2	Kepala Daerah	5 %	<ul style="list-style-type: none"> • Gratifikasi • Perbuatan curang
3	ASN Pemerintah	65 %	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerasan • Penggelapan • Penyuapan
4	Aparat Hukum	5 %	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerasan • Penggelapan • Penyuapan
5	Jajaran Direksi BUMN	29 %	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerasan • Penggelapan • Penyuapan

Sumber : KPK, 2022

Berdasarkan pada tabel tersebut, komponen bangsa yang diantaranya merupakan pejabat publik, dimana seharusnya mereka menjadi teladan bagi masyarakat justru terlibat beberapa pelanggaran yang mengakibatkan mereka berurusan dengan pelanggaran kode etik dan berujung pada tindakan pidana seperti penyalahgunaan wewenang yang mengacu pada pemanfaatan jabatan tertentu untuk keuntungan suatu pihak maupun keuntungan pribadi, hingga tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sepanjang 2021 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 29.438 Triliun.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sebagaimana data yang dirilis KPK justru merata pada hampir seluruh jabatan, mulai dari jabatan Menteri, Gubernur, Bupati hingga ASN jajarannya. Mengacu pada rendahnya kondisi keteladanan yang dialami bangsa Indonesia, beberapa hal yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan, peran dan fungsi *technical majority* (banyak dalam berperan)

dan memberikan warna dalam system kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikorelasikan dengan konteks peran, Soekanto (2002), menyebutkan bahwa Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dia melakukan peran. Sedangkan status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, kemudian ia berperanan dalam menjalankan suatu fungsi di masyarakat ataupun dalam sebuah sistem sosial.

Soekanto (2002) juga mendefinisikan fungsi peran sebagai berikut²⁵: pertama Peran Preventif adalah merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadi suatu keadaan yang mengganggu sehingga keadaan tersebut dapat dihindari atau dicegah. Mengacu pada landasan teori tersebut dikorelasikan dengan upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan keteladanan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional pada Lembaga negara dan lembaga Agama untuk memicu/mewujudkan keteladanan, yaitu sebagai berikut:

a. **Optimalisasi keteladanan oleh lembaga negara.** Keteladanan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dapat dilakukan dengan berperan sebagai pemberi contoh utama dalam implementasi Nilai-nilai kebangsaan, hal tersebut dapat dilakukan dengan mempraktekan dan memberikan teladan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini beberapa peran yang dapat di implementasikan oleh lembaga-lembaga negara dalam memaksimalkan keteladanan nilai-nilai kebangsaan sebagai berikut :

- 1) **Peran preventif.** Dapat dilakukan lembaga negara dengan memberikan teladan dan contoh Pendidikan karakter, Pendidikan karakter dengan mengembangkan cara cara internalisasi nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa,;

25. Soekanto, Soerjono (2002) Pengantar sosiologi, Jakarta : penerbit Raja Grafindo persada

- a) Membuka ruang untuk mengalami dan menjalankan situasi tertentu dengan melibatkan pejabat publik/peserta didik menjadi pekerja sukarela pada layanan sosial;
- b) Memberikan kesempatan memahami situasi tertentu sebagai contoh untuk memahami gender datang kelapas perempuan melakukan wawancara dan pendalaman;
- c) Membuat program atau komunitas yang membuat pelaporan pejabat publik dan media saling ingatkan untuk konsisten menjadi teladan dilingkungannya

2) **Peran Persuasif.** Peran persuasif lembaga negara dalam memberikan teladan nilai-nilai kebangsaan dapat dilakukan dengan beberapa tindakan seperti mengaplikasikannya dalam berbagai program yang akan diberikan kepada masyarakat, maupun di implementasikan pada tugas pokok sebagai lembaga negara, dengan tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Pemberian *reward* keteladanan kepada pejabat publik. Pemberian *reward* atau penghargaan dapat diberikan dalam berbagai lingkup instansi pemerintah seperti kementerian hingga pemangku pemerintahan di daerah, dalam lingkup lintas kementerian Presiden dapat mengadakan anugerah keteladanan pada jajaran kementerian yang berprestasi dan layak diteladani sehingga mampu menjadi *role model* bagi lainnya, sedangkan dalam lingkup pemerintah daerah, Kementerian dalam negeri dapat mengadakan anugerah keteladanan bagi kepala daerah berprestasi.

b) Pemberian *reward* keteladanan kepada tokoh pemuda. Selain kepada pejabat publik, generasi muda juga perlu mendapatkan porsi sehingga dapat dijadikan contoh oleh generasi muda lainnya, pemberian *reward* ini dapat dilakukan oleh Kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) untuk

memberikan anugerah pemuda teladan yang telah memberikan kontribusi dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan, dengan adanya *reward* kepada generasi muda maka dapat menjadi sebuah pemantik bagi generasi muda lainnya untuk dapat berkontribusi terhadap implementasi nilai-nilai kebangsaan berdasarkan 4 konsensus Pancasila.

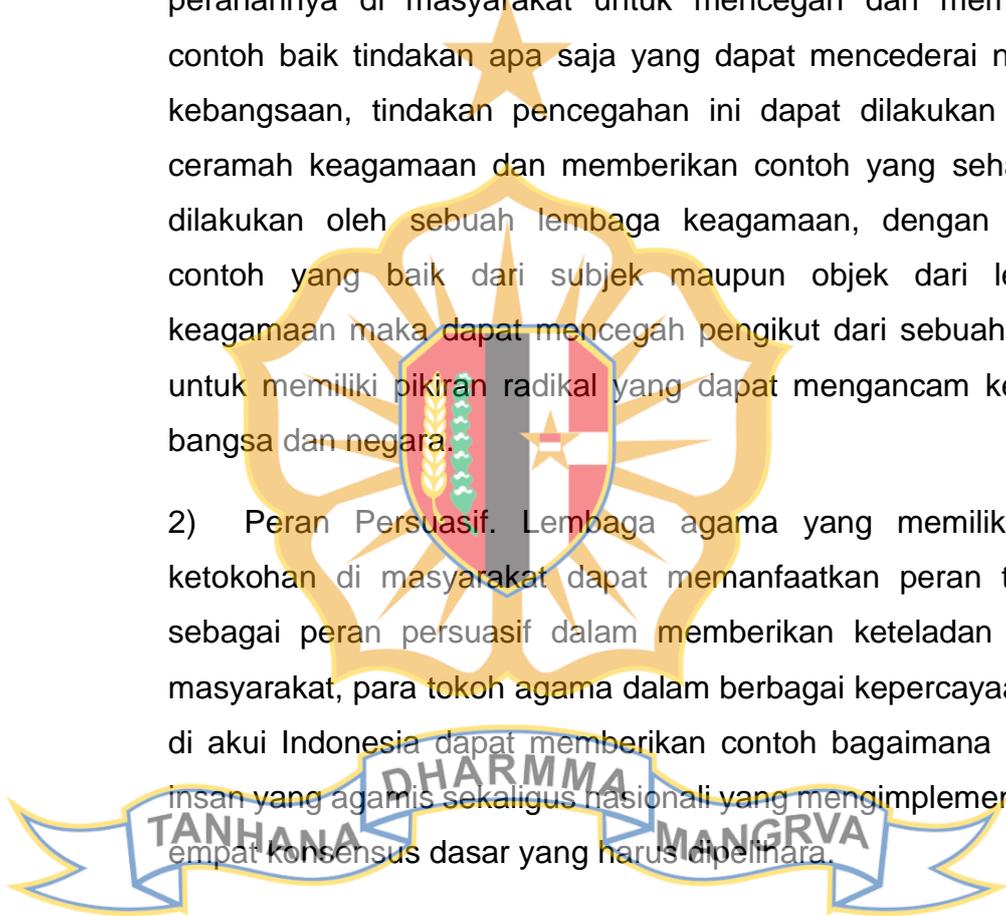
c) Membangun narasi publik. Perlu disadari bahwa lemahnya keteladanan salah satunya adalah lemahnya narasi publik yang dilakukan oleh media massa terhadap pejabat publik yang memiliki kinerja baik, sehingga bekerjasama dengan media massa untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan membangun narasi publik dengan menjadikan beberapa tokoh sebagai inspirasi, mengingat cukup banyak pejabat publik yang memiliki kinerja mumpuni dan dapat diteladani.

b. Optimalisasi keteladanan oleh Lembaga Agama. sebagaimana dikutip dalam laman Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kebangpol Kemendagri) bahwa komponen bangsa dapat didefinisikan dalam konteks historis sebagai komponen-komponen pembentuk negara dan komponen yang terlibat dalam kesepakatan bentuk dan ideologi negara seperti dari komponen agama, komponen nasionalis dan komponen Hankam yang diaktualisasikan, dengan mengacu pada temuan fakta bahwa lemahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai kebangsaan kerap kali dibenturkan oleh isu agama, maka Lembaga agama sebagai salah satu lembaga yang paling banyak diikuti oleh masyarakat dapat berperan dalam memaksimalkan penanaman nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan 4 konsensus dasar bangsa di masyarakat.

Dalam perspektif Indonesia, lembaga agama sendiri termasuk kedalam lembaga sosial yang beroperasi pada ranah yang berhubungan dengan hal keagamaan dan non keagamaan, mengingat di Indonesia lembaga agama kerap kali digunakan dalam mengatasi berbagai

persoalan yang bukan saja mengurus perihal agama, peranan lembaga agama sendiri cukup vital dalam memberikan keteladanan kepada masyarakat, mengingat saat ini cukup banyak oknum yang menyalahgunakan elemen agama sebagai alat untuk memecah belah masyarakat, peranan agama dalam konteks ini dapat dilakukan dengan beberapa tindakan sebagai berikut:

- 1) Peran Preventif. Lembaga agama dapat memanfaatkan peranannya di masyarakat untuk mencegah dan memberikan contoh baik tindakan apa saja yang dapat mencederai nilai-nilai kebangsaan, tindakan pencegahan ini dapat dilakukan melalui ceramah keagamaan dan memberikan contoh yang seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga keagamaan, dengan adanya contoh yang baik dari subjek maupun objek dari lembaga keagamaan maka dapat mencegah pengikut dari sebuah agama untuk memiliki pikiran radikal yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara.
- 2) Peran Persuasif. Lembaga agama yang memiliki unsur ketokohan di masyarakat dapat memanfaatkan peran tersebut sebagai peran persuasif dalam memberikan keteladanan kepada masyarakat, para tokoh agama dalam berbagai kepercayaan yang di akui Indonesia dapat memberikan contoh bagaimana menjadi insan yang agamis sekaligus nasionalis yang mengimplementasikan empat konsensus dasar yang harus dipelihara.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.

Dari uraian sebagaimana yang telah disampaikan diatas, tergambar jelas bahwa pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional mengalami berbagai dinamika yang menyebabkan pemntapan nilai-nilai kebangsaan menghadapi berbagai kendala yang harus diselesaikan secara komprehensif, untuk lebih menjawab segala permasalahan yang ditemukan, dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

- a. Lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa. indikator lemahnya pemahaman nilai-nilai sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik Kementerian dalam negeri (Kesbangpol Kemendagri) yang menyampaikan bahwa maraknya penyebaran Hoax dan ujaran kebencian (hate speech) merupakan salah satu indikator bahwa pemahanan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lemah, dimana hoax dan ujaran kebencian merupakan penyebab utama dari disintegrasi bangsa selama separuh dekade terakhir Sepanjang tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan sekitar 565.449 konten bermuatan hoax yang tersebar di Media sosial, media online hingga Penyedia layanan Chat/Pesan dan Ujaran kebencian kebencian memiliki hubungan terkorelasi dengan hoax, dimana hoax yang muncul di berbagai platform juga kerap kali berisi ujaran kebencian, dimana dampaknya adalah Disintegrasi antar komponen bangsa, beberapa temuan dari lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dari beberapa lembaga tersebut dapat dilihat dari laporan peristiwa, fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan lembaga negara menjadi salah satu sasaran potensial bagi penyebaran paham anti Pancasila dan radikalisme, dan dapat di asumsikan dengan adanya oknum ASN

yang melakukan pelanggaran tersebut, maka pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan integrasi nasional dalam lingkup lembaga negara belum optimal.

b. Dalam konteks lemahnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dapat dikategorikan menjadi beberapa indikator seperti menurut data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik menyebutkan seperti pertama fenomena yang tidak sesuai demokrasi terjadi selama satu dekade terakhir terkait dengan politik identitas dan politik uang (*Money Politic*), *kedua* fenomena yang tidak sesuai persatuan bangsa Indikator dari fenomena ini adalah adanya konflik yang didasarkan pada unsur SARA, dimana konflik disebabkan karena mudahnya massa terprovokasi oleh berbagai hal. Ketiga fenomena yang tidak sesuai toleransi, Salah satu penyebab timbulnya konflik maupun pudarnya nilai-nilai kebangsaan salah satunya adalah Intoleransi. Oleh karenanya perilaku yang tidak sejalan dengan standar toleransi adalah intoleransi. Intoleransi dengan sendirinya mengancam segi-segi kemajemukan yang kita miliki, termasuk ideologi tengah yang dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu Pancasila, dan keempat adalah fenomena yang tidak sesuai keadilan, ketidakadilan masih menjadi salah satu fenomena yang kerap terjadi di negeri ini, dimana ironisnya kerap kali beberapa diantaranya melibatkan aparat dan lembaga negara, beberapa fenomena yang terjadi selama ini diantaranya ketidakadilan dalam proses hukum. Unsur kesamaan untuk diperlakukan di mata hukum masih menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum di Indonesia, dimana dalam beberapa kasus masih terjadi tebang pilih dalam proses hukum. beberapa kendala besar yang dihadapi oleh bangsa indonesia dalam Implementasi nilai-nilai kebangsaan adalah lemahnya *national building* akibat ideologi transnasional berbalut agama dan lemahnya *national building* akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan.

c. Rendahnya keteladanan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa merupakan aspek vital dimana sosok figur panutan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, rendahnya keteladanan dapat dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang muncul justru berasal dari sosok yang idealnya menjadi panutan masyarakat seperti pejabat publik seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh beberapa petinggi negara, juga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sepanjang 2021 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 29.438 Triliun dengan persentase 19 % dalam bentuk gratifikasi, Penyuaan dengan persentase 14.9 %. Penggelapan dalam Jabatan 4.9 %. Perbuatan curang 1.7 % dan pemerasan 0.2 %, KPK menyebutkan persentase tersebut terjadi dari 127 Penyidikan dan 123 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, beberapa hal yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, peran dan fungsi *technical majority* (banyak dalam berperan) dan memberikan warna dalam system kehidupan berbangsa dan bernegara melalui optimalisasi keteladanan oleh lembaga negara. Keteladanan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dapat dilakukan dengan berperan sebagai pemberi contoh utama dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan dan optimalisasi keteladanan oleh lembaga agama.

17.

Rekomendasi

Dengan memperhatikan banyaknya dinamika yang ditemukan di lapangan terhadap pemantapan nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa guna mendukung pembangunan nasional, maka diharapkan stakeholder terkait dapat mengambil kebijakan yang tepat agar mampu mengakomodir semua kepentingan dan permasalahan yang muncul dan proses pemantapan nilai nilai kebangsaan dapat berjalan dengan efektif, sehingga beberapa rekomendasi yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

a. Sekjen DPR, Bappenas, Lemhannas RI, BPIP, Wamtanas, Kemenhan, Kemenko PMK , Kemendagri perlu membangun sinergitas

dan kolaborasi terhadap program pemantapan nilai-nilai kebangsaan mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi dengan agenda baru atau memanfaatkan agenda yang sudah terprogram seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. Perlunya DPR mendukung regulasi/peraturan terkait dengan pembelajaran orang dewasa dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan dalam dunia kerja, sehingga menjadi salah satu upaya mereduksi terjadinya pelemahan terhadap pemahaman nilai kebangsaan.

c. Perlunya *Stakeholder* terkait seperti Lemhannas maupun BPIP membangun *roadmap* pembelajaran orang dewasa dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan, baik dalam instansi yang bersifat publik maupun privat, sehingga penanaman nilai-nilai kebangsaan tidak berhenti pada tingkatan Pendidikan formal dan terus berjalan hingga memasuki dunia Kerja.

d. Perlunya DPR menjadi *leading sector* dalam menciptakan iklim politik yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan yang berhubungan dengan SARA, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menjadi bagian dari dampak kebijakan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang diimplementasikan, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan.

e. Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kemenpan RB mendukung pembiayaan mandiri program kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang diberikan organisasi berbadan hukum kepada Kementerian/Lembaga sebagai penyelenggaranya dengan mempermudah/mempercepat proses birokrasi dan pertanggungjawabannya

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Abdulsyani, S (1994) Pengantar sosiologi, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Adies Kadir (2018) Menjaga Moral Pejabat Publik, Jakarta: Penerbit Merdeka Book
- Budiarjo, Miriam (2008) Pengantar Ilmu Politik, Jakarta :Universitas Indonesia Press
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Duffey, T. (2000) Cultural Issues in Contemporary Peacekeeping, International Peacekeeping, Newyork : Harvard Publisher.
- Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyatuti, M.Si. (2012) Implementasi Kebijakan Publik-Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta:Penerbit Gaya media.
- Haryatmoko,(2020) Jalan Baru Kepemimpinan & Pendidikan Jawaban atas tantangan Disrupsi-Inovatif, Jakarta: Penerbit Gramedia
- Linton, Ralph (1984) Antropologi : Suatu penyelidikan tentang Manusia, Bandung : Penerbit Jemmans.
- Soekanto, Soerjono (2002) Pengantar Sosiologi, Jakarta :Penerbit Raja Grafindo Persada
- Soemardjan, Selo (1980) Kemiskinan structural : Suatu bunga rampai, Jakarta : Penerbit Yayasan Ilmu Sosial.
- Sugiyono (2018) Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Yudi Latif. (2014) Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam perbuatan, Jakarta : Penerbit Mizan
- Yusuf. MA. (2017) Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan, Jakarta : PT Fajar interpratama Mandiri.

Peraturan/Perundangan.

- Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang negara dan lagu kebangsaan.

Undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2016 tentang Lemhannas RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang badan pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman pemda dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2011 tentang pedoman pemerintah daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Intruksi Presiden Republik Indonesia no 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi Mental.

Website Internet

Abdul Kadir (2019) Memudarnya nilai-nilai Pancasila pada generasi Muda, diakses dari www.kompasiana.com

Alimin Anwar (2020) Budaya Indonesia menghilang seiring waktu, diakses dari www.tribunnews.com

Beny Sanjaya (2018) Lembaga negara, tujuan dan fungsi, diakses dari www.prestasireformasi.com

Kalimahsahwa (2020) bagaimana "wacana pancasila" menurut HTI? Diakses dari www.kalimahsahwa.id pada tanggal

Kesbangpol Tanjung Jabung (2019) kemendagri ingatkan kepala daerah tidak lepas tanggung jawab soal wawasan kebangsaan, diakses dari www.kesbangtanjabtimkab.go.id

Lemhannas RI (2020) Lemhannas RI selenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan secara virtual, diakses dari www.lemhannas.go.id

PVMBG (2020) rencana nasional penanggulangan bencana dan demografi di Indonesia, diakses dari www.pvmbg.org.

Syahidin Syahid (2019) Sekias tentang budaya Indonesia, Diakses dari www.indonesia-frankfurt.de

**PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA KOMPONEN BANGSA
GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL**

LAMPIRAN-1

ALUR PIKIR



Platform Media Penyebar isu SARA & Hoax

No	Jenis Media	Persentase sebaran isu	Jenis Sebaran Isu
1.	Facebook	82,25% Hoiax terdapat di Facebook	Politik, Agama. SARA
2.	WhatsApp	56,55% Hoax tersebar melalui WhatsApp Grup	Politik, Agama
3.	Instagram	29,48% Hoax terdapat di Instagram	Politik, Agama, SARA
4.	Twitter	10, 45 % Hoax Tersebar di Twitter	Politik, SARA
5.	Blog/Blogspot	9.15 % Hoax terdapat di Blog	Politik
6.	Youtube	9,10 % Hoax Tersebar di Youtube	Politik, Agama

Sumber : Laporan Kominfo : 2021





LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
INDEKS KETAHANAN NASIONAL
 PERIODE: Desember 2021



No.	Wilayah	INDEKS KETAHANAN NASIONAL		Gatra															
				GEOGRAFI		DEMOGRAFI		SUMBER KEKAYAAN ALAM		IDEOLOGI		POLITIK		EKONOMI		SOSIAL BUDAYA		PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
				Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank	Skor	Rank
1	NASIONAL	2,55		2,63		3,37		2,40		2,28		2,31		2,77		2,43		2,52	
2	ACEH	2,41	9	3,27	9	3,78	2	2,35	5	2,22	24	1,81	16	2,45	20	2,41	8	1,94	10
3	SUMATERA UTARA	2,28	27	2,94	21	3,32	20	2,40	4	2,11	27	1,68	23	2,85	11	2,18	14	1,75	19
4	SUMATERA BARAT	2,31	23	2,89	26	3,40	16	2,19	8	2,03	29	1,83	14	2,45	20	2,36	10	2,04	5
5	RIAU	2,34	19	3,48	2	3,54	10	1,44	33	2,21	25	1,92	10	2,67	10	2,36	10	1,76	18
6	JAMBI	2,29	26	3,49	1	3,74	3	1,59	30	1,97	30	1,87	12	2,48	17	2,19	13	1,93	11
7	SUMATERA SELATAN	2,30	24	3,35	7	3,36	17	1,87	20	2,42	19	1,81	16	2,59	14	2,18	14	1,59	24
8	BENGKULU	2,35	17	3,24	11	3,71	4	1,68	26	2,39	20	1,51	28	2,74	8	2,27	11	2,01	7
9	LAMPUNG	2,31	22	3,38	5	3,59	8	1,94	16	2,30	22	1,73	19	2,12	27	2,48	5	1,89	14
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2,45	3	3,46	3	3,57	9	1,88	19	2,12	26	1,93	9	3,07	1	2,44	6	1,81	16
11	KEPULAUAN RIAU	2,37	14	3,01	18	3,53	11	1,80	21	2,43	18	1,80	17	2,50	16	2,56	4	1,91	12
12	DKI JAKARTA	2,40	11	2,92	23	3,42	15	1,79	22	2,83	3	2,13	3	2,35	23	2,58	3	1,59	24
13	JAWA BARAT	2,18	30	2,93	22	3,44	14	2,00	13	1,78	32	1,97	7	2,22	26	2,19	13	1,76	18
14	JAWA TENGAH	2,40	12	3,34	8	3,62	7	2,24	7	2,03	29	2,04	4	2,37	22	2,48	5	1,97	8
15	BANTEN	2,33	21	3,08	14	3,45	13	1,72	25	2,25	23	2,03	5	2,46	19	2,22	12	2,03	6
16	JAWA TIMUR	2,40	10	3,26	10	3,42	15	2,27	6	2,46	17	1,87	12	2,55	15	2,27	11	1,90	13
17	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2,54	2	2,91	24	3,83	1	2,10	9	2,85	2	1,82	15	2,26	25	2,98	1	2,14	3
18	BALI	2,64	1	2,68	30	3,63	6	2,09	10	2,66	8	2,57	1	2,50	16	2,92	2	2,32	1
19	NUSA TENGGARA BARAT	2,41	8	3,07	15	3,30	21	2,76	1	2,35	21	1,98	6	2,47	18	2,22	12	1,94	10
20	NUSA TENGGARA TIMUR	2,15	33	2,72	29	3,30	21	1,48	32	2,51	15	1,81	16	2,26	25	1,78	24	1,84	15
21	KALIMANTAN BARAT	2,30	25	3,37	6	3,35	18	1,56	31	2,50	16	1,84	13	2,86	4	1,95	20	1,57	25
22	KALIMANTAN TENGAH	2,41	6	3,27	9	3,51	12	1,98	14	2,88	1	1,78	18	2,90	2	2,03	18	1,60	23
23	KALIMANTAN SELATAN	2,35	16	3,38	5	3,32	20	1,78	23	2,21	25	1,63	25	2,77	7	2,43	7	1,95	9
24	KALIMANTAN UTARA	2,26	28	2,95	20	3,15	27	2,08	11	2,06	28	2,14	2	2,67	10	2,15	15	1,50	26
25	KALIMANTAN TIMUR	2,42	5	3,04	17	3,40	16	1,89	18	2,79	5	1,90	11	2,60	13	2,40	9	1,81	16
26	SULAWESI UTARA	2,44	4	3,16	12	3,19	26	1,90	17	2,78	6	1,71	20	2,79	6	2,19	13	2,23	2
27	SULAWESI TENGAH	2,39	13	2,90	25	3,20	25	2,57	3	2,80	4	1,71	20	2,80	5	2,04	17	1,75	19
28	SULAWESI SELATAN	2,35	18	3,40	4	3,24	23	2,02	12	2,61	10	1,94	8	2,41	21	2,22	12	1,70	20
29	SULAWESI TENGGARA	2,37	15	3,24	11	3,69	5	1,96	15	2,58	11	1,69	22	2,65	11	1,96	19	2,01	7
30	GORONTALO	2,41	7	2,99	19	3,19	26	2,59	2	2,55	13	1,78	18	2,64	12	2,36	10	1,84	15
31	SULAWESI BARAT	2,25	29	3,05	16	3,34	19	1,65	27	2,57	12	1,64	24	2,55	15	1,88	21	1,91	12
32	MALUKU	2,18	31	2,75	28	3,22	24	1,60	29	2,52	14	1,60	26	2,60	13	1,82	23	1,78	17
33	MALUKU UTARA	2,33	20	2,83	27	3,29	22	1,61	28	2,68	7	1,53	27	2,89	3	2,06	16	2,11	4
34	PAPUA BARAT	2,17	32	3,12	13	3,19	26	1,76	24	2,64	9	1,53	27	2,32	24	1,84	22	1,69	21
35	PAPUA	2,09	34	2,83	22	3,19	26	1,72	25	1,84	31	1,70	21	2,72	9	1,69	25	1,62	22



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DATA POKOK

1. NAMA : TRISMAWAN DJONISAJOKO, S.E.,M,M
2. PANGKAT/KORP/NRP : KOLONEL LAUT (S) NRP NRP10774/P
3. JABATAN TERAKHIR : SAHLI D JEMEN POK SAHLI KOARMADA I

DATA PENDIDIKAN

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. UMUM. <ol style="list-style-type: none"> a. SD b. SMP c. SMA d. S1/SARJANA EKONOMI (S.E) e. S2/MAGISTER MANAJEMEN (M,M) | <ol style="list-style-type: none"> 2. MILITER. <ol style="list-style-type: none"> a. AAL/1993 b. DIKLAPA-1/1996 c. DIKLAPA-2/2001 d. SESKOAL-46/2008 e. LEMHANNAS-PPRA 63/22 |
|--|---|

RIWAYAT JABATAN

1. KADEPLOG KRI YOS 353 KOARMATIM/1993
2. KADEPLOG KRI TCB 352 KOARMABAR/1996
3. KASISILTA PEKAS DENMA MABESAL/1998
4. PEKAS LANAL BALIKPAPAN/LANT IV/KOARMATIM/1999
5. KEPALA MIMBAR AJARAN PERBEKALAN KODIKAL/2002
6. PEKAS RUMKITAL dr. MINTOHARDJO /2003
7. KASUBSI MINTRAK DISADAL MABESAL/2006
8. PARIKMATBEK/ITDAMAT/ITBIN/ITJENAL/ MABESAL/2008
9. PEKAS MAKO KORMAR/2009
10. PABANDYA RENPROGRAR/BAN IV/SRENAL/MABESAL/2013
11. KABAGDALGAR ROENKU/2014
12. KABAGRENGAR ROENKU/2016
13. KASUBDIT EVBANG DITRENBANG DEBIDTAPLAIKBS/2019

TANDA - TANDA JASA

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. BT. JALASENA NARARYA 2. SL. KESETIAAN VIII 3. SL. KESETIAAN XVI | <ol style="list-style-type: none"> 4. SL. DWIDYA SISTHA 5. SL. WIRA DHARMA (PERBATASAN) 6. SL. WIRA NUSA |
|--|---|

PENUGASAN SINGKAT LUAR NEGERI

1. NEW ZEALAND, 2. SERBIA, 3. HONGKONG, 4. JEPANG, 5. SPANYOL